



MEDIA INFORMASI POLRI

NEWS

TRIBRATA

TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT



MELAYANI RAKYAT MEMBELA BANGSA DAN NEGARA



08 LAPORAN UTAMA

HARAPAN BESAR
DI PUNDAK BHAYANGKARA

24 KASUS

MEMBONGKAR
PENYELEWENGAN DANA
SUMBANGAN

60 BUNGA RAMPAI

HOEGENG AWARDS 2022
NILAI KETELADANAN
YANG TAK PERNAH PUDAR

78 VIRAL

DORONG MOBIL MOGOK
SAAT HUJAN DERAS,
POLISI INI PANEN PUJIAN

M E M B U K A R U A N G T R A N S P A R A N S I P U B L I K

TRIBRATA NEWS • Edisi VII 2022



POLISI ADALAH KITA



DIVISI HUMAS POLRI



DIVISIHUMASPOLRI



DIVHUMAS_POLRI



@DIVHUMAS_POLRI



Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
KOMBES POL. HENDRA ROCHMAWAN, S.I.K., M.H.

Staf Redaksi
AKBP Drs. SUWANDA, M.Si.
AKBP AHMAD DHARMIANTO, S.H., S.I.K.
PENATA PIPIET RATRIE KURNIA YANTIE, S.Kom.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY., S.I.Kom
PENDA HARYATI, A.Md.
BRIPTU AMANDA
BRIPDA ALDI RASYID

ART DIRECTOR
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI

Fotografer
BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI

Penerbit
BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Buana Inti Sejahtera

Alamat Redaksi
Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141

Redaksi Majalah **Tribrata News** menerima
kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau
ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com

Hari Bhayangkara

Tanggal 1 Juli merupakan hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Merunut sejarahnya, Hari Bhayangkara sejatinya bukanlah hari lahir Polri melainkan momentum turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.

Melalui aturan tersebut kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional yang tunggal.

Tahun ini pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2022 genap berusia 76 tahun, Polri mencatat sejumlah kiprah positif khususnya di masa Pandemi Covid-19.

Di antaranya yakni kemampuan Polri dalam menjaga kondusifitas dalam negeri, mengatasi Pandemi Covid-19, membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga mengawal cita-cita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti.

Tak hanya sukses menanggulangi pandemi, Polri juga mampu menepis ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Seperti kita tahu, ancaman terorisme, kriminalitas, dan konflik sosial potensial terjadi ketika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan fokus menangani pandemi.

Di sisi lain, sepanjang dua tahun lebih berjibaku dengan pandemi sektor ekonomi nasional menjadi sektor yang paling merasakan dampaknya. Dalam ikhtiar itulah, Korps Bhayangkara mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk membantu mengawasi proses pembangunan nasional khususnya di masa pandemi dan sesudahnya agar berjalan dengan sesuai dengan harapan.

Peran Polri, baik dalam membantu penanggulangan pandemi Covid-19 secara langsung, maupun dalam hal menciptakan situasi aman selama Pandemi tidak bisa dianggap remeh. Terbukti kinerja Kepolisian sangat membantu Negara dalam memulihkan kembali ekonomi nasional yang sempat terpuruk.

Dalam skala makro, Polri bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman, adil dan kepastian hukum bagi para investor. Pada aspek-aspek itulah alasan utama dan rasional para investor lokal dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di bumi Indonesia.

Keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan skala ekonomi besar di tahun 2045 tentu bakal berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan hal itu, dimensi kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia harus terjamin terlebih dahulu.

Secara teoritis, adanya kepastian hukum yang berkeadilan terbukti mampu mendorong percepatan pengambilan keputusan bagi para pelaku usaha. Bila Polri mampu memastikan hal itu, maka proses pemulihan ekonomi nasional niscaya bisa pulih lebih cepat, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan bisa tetap dilangsungkan.



08 laporan **UTAMA**

Harapan Besar di Pundak Bhayangkara

Di manapun personel Polri bertugas maka akan selalu dalam pengamatan rakyat yang menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat.

24 **KASUS**

- MEMBONGKAR
PENYELEWENGAN DANA
SUMBANGAN



Catatan Sejarah Baru Divisi Humas Polri

36 **INOVASI**

- MENGENAL APA ITU
SUPERAPPS PRESISI

60 **BUNGA RAMPAI**

- HOEGENG AWARDS 2022
NILAI KETELADANAN
YANG TAK PERNAH
PUDAR

44 **UNGGULAN**

- UANG KOIN ITU ANTAR
ROHIMAH GAET
HOEGENG AWARDS 2022

78 **VIRAL**

- DORONG MOBIL MOGOK
SAAT HUJAN DERAS,
POLISI INI PANEN PUJIAN



Foto Cover : istimewa



DIVISI HUMAS POLRI



DIVISIHUMASPOLRI



DIVHUMAS_POLRI



@DIVHUMAS_POLRI

Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meminta para ulama, kiai dan kalangan santri untuk terus mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan doa untuk negeri dan deklarasi Pesantren Kawal NKRI di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Selasa 26 Juli 2022.

Kapolri mengatakan, polarisasi yang muncul pada 2019 akibat perbedaan politik hingga kini masih belum sepenuhnya selesai dan bisa mengancam keutuhan bangsa.

"Gejolak keamanan muncul akibat perbedaan pandangan politik dan sampai sekarang masih dirasakan. Kalau masalah ini tidak diatasi, bisa mengancam keutuhan bangsa," kata Kapolri.



Polarisasi akibat perbedaan politik tidak boleh muncul pada Pemilu 2024. Kapolri pun mengajak para ulama, kiai dan santri untuk terus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan.

"Para santri sebagai generasi penerus harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, bangga Indonesia memiliki keberagaman. Kalau keberagaman hilang maka yang terjadi adalah seperti di Timur Tengah. Kita tidak boleh seperti itu. NKRI harga mati ini harus dijaga betul. Kalau ada yang mengusik kita peringatkan bareng," kata Kapolri. [*]

Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyerahkan 112 sapi dalam rangka memperingati Idul Adha 1443 H. Penyerahan 112 sapi kurban ini menjadi bentuk pengabdian untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

"Baru saja kita bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha, mulai dari Salat Id, dan selanjutnya baru saja kita melaksanakan penyerahan hewan kurban," kata Kapolri, Minggu 10 Juli 2022.

Penyerahan 112 sapi kurban tersebut dilakukan secara simbolik di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri menuturkan, 112 hewan kurban tersebut merupakan bentuk keikhlasan dan pengabdian seluruh personel Polri kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Diharapkan keikhlasan dan pengabdian seluruh anggota Korps Bhayangkara bisa mewujudkan Polri yang Presisi.



"Tentunya, ini semua kita lakukan sebagai bentuk keimanan, ketulusan, dan keikhlasan sebagaimana tema dan nilai-nilai pengorbanan serta keikhlasan, sehingga ini juga diharapkan bisa menjadi bentuk pengabdian personel, untuk mewujudkan Polri yang Presisi," kata Kapolri.



Mabes Polri menggelar kegiatan pagelaran wayang kulit bertajuk Semar Mbangun Kahyangan yang digelar secara terbuka di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Juli 2022.

Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengungkapkan, kegiatan wayang kulit satu layar tiga dalang yang masih satu rangkaian dalam momentum HUT Bhayangkara ke-76 ini, juga wujud dari komitmen Polri untuk terus bisa dekat dan melebur bersama dengan masyarakat Indonesia.

“Dan yang paling penting adalah kegiatan kali ini menjadi bagian ikhtiar kita melaksanakan ulang tahun bersama-sama dengan masyarakat, dengan menonton wayang kulit lakonnya Semar m’bangun khayangan,” kata Kapolri.

Tak hanya itu, ditekankan juga bahwa pentas pewayangan ini merupakan salah satu warisan budaya dari sekian banyak yang ada di Indonesia yang harus terus dilestarikan. Karena didalamnya, banyak nasihat dan pesan-pesan positif yang disampaikan.



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri acara launching Rumah Kebangsaan’ yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin 27 Juni 2022.

“Tentunya hari ini saya sangat mengapresiasi terkait dengan launching yang dilakukan oleh teman-teman pemuda dan mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus yang melakukan kegiatan untuk bersatu di dalam Rumah Kebangsaan,” kata Kapolri saat menghadiri acara tersebut.

Kapolri berharap, rumah kebangsaan ini dapat dijadikan tempat atau wadah bagi para pemuda dan mahasiswa Indonesia berdiskusi memecahkan masalah terkait isu-isu terkini. Serta, menggagas konsep untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. [*]





MELAYANI RAKYAT, MEMBELA BANGSA DAN NEGARA

Momentum Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76 tahun 2022 menjadi momentum bagi anggota Polri menjadi lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Hari Bhayangkara juga menjadi sarana refleksi, evaluasi dan koreksi diri dalam rangka memperbaiki kinerja.



Harapan Besar di Pundak Bhayangkara

Di manapun personel Polri bertugas maka akan selalu dalam pengamatan rakyat yang menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat.

Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo menyampaikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara.

Atas nama seluruh rakyat Indonesia, Presiden juga menyatakan menaruh harapan besar kepada Polri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin upacara Hari Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 5 Juli 2022.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai tingkat desa dan setiap hari anggota Polri besentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Presiden dalam amanatnya.

Lebih lanjut Presiden menambahkan, di manapun personel Polri bertugas maka akan selalu dalam pengamatan rakyat yang menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat.

“Selain membaca survei, Saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan di lapangan, sekecil apapun, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga kembali mengingatkan bahwa masih banyak tugas berat yang harus dituntaskan termasuk di antaranya pandemi Covid-19, antisipasi





krisis energi, pangan dan krisis keuangan serta ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Menurut Presiden, Polri harus lebih maju dibanding pelaku kejahatan sekaligus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi.

Selain tugas berat yang harus dituntaskan, Presiden juga menekankan setidaknya ada tiga agenda nasional yang harus didukung Polri. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara yang dimaknai untuk membangun motor

kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal dengan puncaknya yakni KTT G-20 di bulan November yang akan dihadiri para Kepala Negara anggota G-20.

Ketiga, agenda besar demokrasi Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak harus diantisipasi dengan baik dengan memberikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik.

“Menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan Kelembagaan Polri harus terus berinovasi. Harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, Kementerian, dan Lembaga dalam menjalankan tugasnya,” lanjut Presiden.

Juga diingatkan kembali oleh Presiden terkait rasa keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga kamtibmas.

"Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," kata Presiden mengakhiri amanatnya.

Sementara itu, menyampaikan sambutan dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmen untuk memegang teguh amanat dari Presiden Joko Widodo sebagai pedoman pelaksanaan tugas kedepannya.

Polri juga siap terus mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045," kata Jenderal Sigit.

Di hadapan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara serta tamu undangan lainnya, Kapolri juga mengungkapkan makna tersembunyi dibalik penentuan Tema HUT Bhayangkara ke-76 tahun ini yakni "Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh."

Spirit dari tema itu, kata Kapolri merupakan wujud dukungan dari Polri terhadap fokus kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dukungan reformasi struktural dalam mewujudkan transformasi ekonomi.

Menurut Kapolri, dalam upaya pemulihan ekonomi pemerintah harus menjaga kondisi perekonomian, termasuk dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui kegiatan antara lain hilirisasi industri, penyiapan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.





APORAN UTAMA

“Melanjutkan pembangunan infrastruktur serta program Food Estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan dan energi,” kata Jenderal Sigit.

Disampaikan juga oleh Kapolri, untuk mengoptimalkan dukungan tersebut, Polri juga telah membentuk satgas, mulai dari pencegahan korupsi, satgas kawal investasi, satgas anti-mafia tanah.

Pembentukan satgas-satgas tersebut dilakukan untuk memastikan pencegahan terjadinya potensi kebocoran pendapatan negara, serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi.

Ditegaskan juga, Polri juga terus mengawal kebijakan Pemerintah soal gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Terkait hal ini, Korps Bhayangkara menempati di urutan ketiga soal realisasi tertinggi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” kata Kapolri.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta prima terhadap masyarakat Indonesia hingga titik terjauh. Penggunaan teknologi itu untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta meningkatkan PNPB melalui Polri.





Dipaparkan oleh Kapolri, terkait pelayanan kepolisian kini juga fokus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Bahkan, Pusdokkes Polri juga telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat dan anggota Polri.

"Polri juga berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan artificial intelligence dan big data kepolisian untuk mewujudkan pemolisian prediktif dan pelayanan kepolisian berbasis teknologi," kata Kapolri.

Sedangkan dari aspek reformasi birokrasi, tahun ini Polri terbukti tetap sanggup mempertahankan capaian positif soal laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.

Menyoal tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolri menjelaskan saat ini Kepolisian terus mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemolisian prediktif. Termasuk penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif utamanya terhadap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil atau pencari keadilan lainnya.

Meski begitu, Polri juga tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas terhadap seluruh tindak pidana kejahatan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

"Dengan tetap melakukan penegakan hukum yang tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan dan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Kapolri. [*]



APORAN UTAMA

Merentang Jejak Panjang
Korps
Bhayangkara



Peringatan Hari Bhayangkara jatuh setiap 1 Juli yang juga merupakan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia atau HUT Polri. Penetapan tanggal tersebut sebagai hari ulang tahun bersamaan dengan momentum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11/S.D tentang Djawatan Kepolisian.

Aturan tersebut mengeluarkan Djawatan Kepolisian menjadi jawatan tersendiri di bawah Perdana Menteri.

Ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Soedarsono, diputuskan bahwa Djawatan Kepolisian yang semula berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dan menjadi jawatan tersendiri di bawah pimpinan Perdana Menteri.

Dalam dokumen yang ditetapkan di Yogyakarta, 25 Juni 1946 aturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946. Melalui aturan tersebut kepolisian yang semula terpisah

sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional yang tunggal.

Sebelumnya, ketika Polri berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara tugasnya hanya meliputi masalah administrasi, sedangkan masalah operasional menjadi tanggung jawab Jaksa Agung.

Tanggal 1 Juli inilah yang kemudian diperingati sebagai HUT Polri dan Hari Bhayangkara. Lantas, bagaimana





sejarah Hari Bhayangkara dan perjalanan Polri dari masa ke masa?

Era Kerajaan

Jauh sebelumnya digunakan oleh Polri, sebutan Bhayangkara merujuk pada masa Kerajaan Majapahit yang merupakan prajurit-prajurit pilihan pengawal raja. Nama Bhayangkara pertama kali muncul di era Singasari.

Pada Kitab Nagarakretagama pupuh IX pada 1 dijelaskan sehubungan mangkatnya Raja Tohjaya di Katang Lambang di daerah Pasuruhan tahun 1248, maka di antara barisan pengawal

yang berkewajiban menjaga keamanan kraton adalah Kesatuan Bhayangkara.

Nama kesatuan ini kembali disebut dalam peristiwa pemberontakan Jayakatwang dari Gelang-Gelang yang berhasil menguasai Kutaraja dan menewaskan Raja Kertanegara.

Istana di Kutaraja berhasil dikuasai pemberontak karena sebagian besar pasukan kerajaan termasuk Bhayangkara berada di Melayu mencegat tentara Mongol dalam ekspedisi Pamalayu.

Kesatuan ini mencapai puncak keharuman namanya ketika berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja kedua Majapahit saat terjadi pemberontakan para Dharmaputra pimpinan Ra Kuti.

Ketika istana jatuh ke tangan pemberontak, Gajah Mada memimpin 15 anggota Bhayangkara mengungsikan sang raja ke luar ibu kota yakni ke Desa Bedander.

Menjaga kerahasiaan tempat pengungsian, Gajah Mada sama sekali tak tidak mengizinkan anggota pasukan Bhayangkara meninggalkan desa.





Gajah Mada menyampaikan amanat untuk ditaati dan dijalankan oleh anggota Bhayangkara yakni Bhayangkara Satyahaprabu atau setia kepada negara dan raja, Bhayangkara Hanyaken Musuh atau bertindak untuk selalu melenyapkan musuh, Bhayangkara Gineung Pratidina atau tekad mempertahankan negara dan Bhayangkara Tan Satriksna yang berarti sikap hati nurani yang ikhlas tanpa pamrih.

Seiring dengan pengangkatan Gajah Mada menjadi mahapatih, Bhayangkara tampil menjadi kekuatan sipil yang berpengaruh. Keselamatan

raja dan keluarganya berada mutlak di bawah kewenangan dan tanggung jawab Bhayangkara. Di masa itu kesatuan tersebut juga berhasil merebut kepercayaan yang kuat di hati masyarakat sebagai pengayom dan pelindung rakyat.

Era Kolonial

Di era penjajahan kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi. Saat itu, pribumi terpilih bertugas menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Di masa ini, Belanda membentuk berbagai kepolisian, seperti veld politie atau polisi lapangan, stands politie atau polisi kota, cultur politie atau polisi pertanian hingga bestuurs politie atau polisi pamong praja.

Sejalan dengan administrasi negara saat itu, kepolisian juga menerapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat sebagai hood agent atau bintangara, inspektur van politie, dan commissaris van politie. Bergabung dengan pasukan kepolisian, pribumi hanya menjabat

sebagai mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Sedangkan cikal bakal dari terbentuknya Polri saat ini, adalah kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pendudukan Jepang

Pada masa ini tentara pendudukan Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi beberapa bagian.

Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur di Makassar dan Kepolisian Kalimantan di Banjarmasin.

Pada setiap kantor kepolisian daerah tersebut meski dikepalai oleh pejabat kepolisian bangsa Indonesia tetap selalu didampingi seorang pejabat Jepang yang disebut sebagai sidokan. Pada praktiknya, pejabat ini tetap saja lebih berkuasa dibanding kepala polisi.

Setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu, mereka membubarkan





beberapa organisasi seperti Peta dan Gyu-Gun. Namun namun saat itu kesatuan polisi tetap dipertahankan termasuk pada waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara de-fakto saat itu secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka.

Periode 1945-1950

Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pembentukan BKN

disusul dengan pelantikan R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945.

Dalam aturan ini organisasi kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara administratif sedangkan secara operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi kepolisian dimiliki oleh setiap negara bagian. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Setelah pembentukan Negara Kesatuan



Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/S.D.

POLISI. DJAWATAN KEPOLISIAN.
Perubahan dalam Djawatan Kepolisian yang
menjadi djawatan tersendiri dibawah pim-
pinan Perdana Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat akan usul Dewan Menteri :

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Djawatan Kepolisian, yang sekarang masuk dalam lingkungan Kementarian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan djawatan tersendiri yang langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri ;
2. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1946.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 25 Djuni 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri.

ttd.

SOEDARSONO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Djuni 1946.

Sekretaris Negara.

A. G. PRINGGODIGDO.

Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, kepolisian dilebur menjadi satu dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat itu kepolisian di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut terlibat dalam pertempuran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kepolisian saat itu menyatakan diri sebagai combatant dan tidak tunduk pada Konvensi Jenewa.

Pada masa kabinet presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan ketetapan pemerintah

Nomor 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa kepolisian dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukannya sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa ini, Kapolri R.S. Soekanto mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin oleh KBP Umar Said.

Menyusul hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuklah Republik Indonesia Serikat, maka R.S Soekanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Pada Kepres RIS N 22 Tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijakan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Sedangkan dalam hal administrasi dan pembinaan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Orde Lama

Setelah penetapan bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, Indonesia memberlakukan sistem parlementer dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masih dikepalai R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, kini kepolisian bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri/presiden.

Pada masa ini, kepolisian memiliki organisasi dan peraturan gaji sendiri. Kepolisian juga memiliki status tersendiri yang terpisah antara sipil dan militer.

Menyusul lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Dekrit ini juga sebagai tanda Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum.

Saat itu, Polri masih tetap di bawah Perdana Menteri yang jabatannya diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Barulah saat keluarnya Keppres Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli, Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.



Pada 13 Juli 1959, melalui Keppres Nomor 154 Tahun 1959, Kepala Kepolisian juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama Nomor 1/MP/RI 1959, sebutan Kepala Kepolisian Negara (KKN) diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara.

Melalui Tap MPRS No. II dan III Tahun 1960, dibentuklah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara.

Orde Baru

Pada 1967, guna meningkatkan integrasi ABRI, ditetapkan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian.

Masing-masing unsur tersebut, dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam/Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), yang dijabat pertama kali oleh Jenderal Soeharto. Setelah Soeharto terpilih menjadi presiden pada 1968, jabatan Menhankam/Pangab kemudian beralih kepada Jenderal M. Panggabean.

Namun, Angkatan Kepolisian yang pada dasarnya bukan angkatan perang menjadi sulit berkembang. Hingga akhirnya pada 1969, melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Bedanya, Kepala Kepolisian Negara RI tak lagi disingkat menjadi KKN, melainkan Kapolri. Pergantian ini sendiri diresmikan tepat pada perayaan Hari Bhayangkara 1 Juli 1969.





Era Reformasi

Seiring dengan bergulirnya reformasi di tahun 1998, muncul tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dan menjadi lembaga yang profesional dan mandiri serta tidak diintervensi pihak lain. Gagasan itu direalisasikan oleh Presiden B. J Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 yang menyatakan Polri dipisahkan dari ABRI.

Pemisahan tersebut dikuatkan melalui amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana ditegaskan bahwa Polri bertanggung jawab dalam

keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggungjawab atas bidang pertahanan.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekaroputri yang menyatakan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Undang-undang tersebut juga menyatakan Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih serta tunduk pada peradilan umum. [*]



ACT

AKSI CEPAT TANGGAP

F O R H U M A N I T Y

Membongkar Penyelewengan Dana Sumbangan

Diduga para petinggi yayasan ACT diduga bermewah-mewahan menggunakan uang hasil sumbangan masyarakat.

Polisi mengumumkan penetapan empat tersangka aksi penggelapan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senin, 25 Juli 2022. Keempat petinggi yayasan tersebut adalah Ahyudin, Novariadi Imam Akbari, Heryana Hermai, dan Ibnu Khajar.

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya menjelaskan peran masing-masing para tersangka tersebut.

Disebut Ahyudin merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan ACT dan Ketua Pembina pada 2019-2022. Ahyudin

disebut mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana donasi dan menjadi pengurus untuk mendapatkan gaji.

"Mendirikan yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi, kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina pengawas dan pengurus, telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin 25 Juli 2022.

Pada 2015, Ahyudin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat SKB

pembina. Hal ini terkait pemotongan donasi sebesar 20-30 persen. Selanjutnya, pada 2020, keempat tersangka diduga membuat opini dewan syariah terkait pemotongan dana operasional dari dana donasi. Ahyudin juga disebut menggerakkan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing.

"Tahun 2020 bersama membuat opini dewan syariah dan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30 persen dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan



Boeing terhadap ahli waris korban Lion Air JT-610," tuturnya.

Sedangkan peran tersangka Ibnu Khajar, menurut Brigjen Ramadhan merupakan Ketua Pengurus ACT periode 2019 sampai sekarang. Dia diduga memiliki peran membuat perjanjian kerja sama dengan para vendor terkait Boeing.

"Saudara IK juga membuat perjanjian kerja sama dengan para vendor yang mengerjakan proyek QSR terkait dana kemanusiaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT-610," kata dia.

Sementara itu, tersangka lain yakni Hariyana Hermain bertindak sebagai Ketua pengawas ACT pada 2019-2022 dan bertanggung jawab terhadap pembukuan dan keuangan ACT. Di mana seluruh pembukuan dan keuangan ACT

adalah otoritas yang bersangkutan. Pada periode ketua Ibnu Khajar Hariyana adalah anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut.

Selain itu, ada N Imam Akbari yang merupakan anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT. Imam disebut bertugas menyusun dan menjalankan program ACT.

"NIA menyusun program dan menjalankan program dan merupakan bagian dari dewan komite dan ACT yang turut adil menyusun kebijakan Yayasan ACT," kata Rhamadan.

Awal Mula

Dugaan penyelewengan dana di tubuh ACT pertama kali terungkap melalui laporan jurnalistik Majalah Tempo yang menyebut para petinggi

yayasan ACT, khususnya Ahyudin, diduga bermewah-mewahan menggunakan uang hasil sumbangan masyarakat.

ACT adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual.

Setelah ramai menjadi perbincangan publik, manajemen ACT akhirnya meminta maaf yang disampaikan Presiden ACT yang saat ini dijabat Ibnu Khajar. "Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini," kata dia dalam konferensi pers di kantor pusat



“Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta) kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen,”

• ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 4 Juli 2022.

• Dalam keterangan tersebut ia membenarkan bahwa para petinggi ACT diganjar gaji ratusan juta rupiah hingga difasilitasi mobil mewah. Namun demikian, imbalan fantastis itu pada akhirnya dikurangi karena donasi yang masuk ke ACT berkurang.

• “Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta) kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen,” kata Ibnu.

• Lebih lanjut ia berdalih karena kondisi keuangan yang memburuk, pada September 2021 ACT memutuskan

• mengurangi gaji seluruh karyawan. Ibnu pun mengaku dirinya mendapat gaji tidak lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

• Sedangkan terkait pemotongan uang sumbangan hingga Rp 13,7 persen, ia beralasan dana tersebut digunakan untuk operasional, termasuk membayar gaji karyawan dan para petinggi ACT. Ibnu mengklaim, ACT tak mengikuti aturan pemotongan donasi lembaga zakat infak sedekah lantaran bukan merupakan lembaga pengumpul sumbangan, melainkan lembaga swadaya masyarakat.

• “Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa ACT adalah lembaga



kemanusiaan yang memiliki izin dari Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Baznas atau Kemenag,” kata dia.

Izin Dicabut

Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT pada 5 Juli 2022. Kementerian tersebut mensinyalir dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan ACT terkait dengan pemotongan dana sumbangan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil

• pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu 6 Juli 2022.

• Sebelum memutuskan mencabut izin PUB ACT, Kemensos lebih dulu mengundang Ibnu Khajar dan sejumlah pengurus yayasan pada Selasa 5 Juli 2022 untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi.

• Dari hasil pertemuan, diketahui bahwa ACT memotong dana sumbangan lebih besar dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Merujuk Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan

• Pengumpulan Sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

• Sementara, ACT memotong dana sekitar 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang sumbangan masyarakat. Dana potongan itu diklaim untuk operasional yayasan.

• “Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” kata Muhadjir.





Transaksi Terlarang

Sementara itu, berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang sudah mengendus dugaan penyelewengan dana menyebut dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.

PPATK mengungkapkan adanya indikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga ACT. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

• Berdasarkan catatan PPATK terdapat
• ratusan miliar transaksi dari dan
• keluar Indonesia yang dilakukan ACT.
• Sebanyak Rp 52,9 miliar di antaranya
• tercatat mengalir ke luar negeri.
• Sedangkan dana masuk dari luar negeri
• sebanyak Rp 64,9 miliar.

• “Berdasarkan data transaksi dari
• dan ke Indonesia periode 2014 sampai
• dengan Juli 2022 yang terkait ACT,
• diketahui terdapat dana masuk yang
• bersumber dari luar negeri sebesar
• total Rp 64.946.453.924, dan dana
• keluar dari Indonesia sebesar total Rp
• 52.947.467.313,” kata Kepala PPATK
• Ivan Yustiavandana pada Kamis, 7 Juli
• 2022.

Perusahaan Cangkang

Sejak kasus ini terbongkar, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri langsung bergerak melakukan penyelidikan. Polri menduga, seluruh pengurus Yayasan ACT menyalahgunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi, bahkan buat aktivitas terlarang.

Pada 8 Juli 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk pertama kalinya memeriksa Ahyudin dan Ibnu Khajar.

Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah meminta keterangan 18 orang saksi

dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pemeriksaan saksi-saksi telah bergulir sejak Dittipideksus melakukan penyelidikan pada Jumat, 8 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut diawali dengan pemeriksaan terhadap petinggi ACT, yakni pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar. Sejak itu pemeriksaan saksi-saksi terus berlanjut sampai penyidik menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan pada Senin, 11 Juli 2022.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan

menyebutkan ada tiga hal yang dialami oleh penyidik dalam kasus ACT.

Ketiganya yakni dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari perusahaan pembuat pesawat Boeing, penggunaan uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya yaitu terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT).

Lebih lanjut juga diungkap, penyidik mengendus pendirian sejumlah perusahaan ini sebagai perusahaan cangkang yang diduga digunakan untuk pencucian uang.

“Perusahaan cangkang yang dibentuk tetapi tidak beroperasi sesuai pendiriannya, hanya untuk sebagai perusahaan money laundering,”





“Perusahaan cangkang yang dibentuk tetapi tidak beroperasi sesuai pendiriannya, hanya untuk sebagai perusahaan money laundering,” kata Whisnu.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang panjang, pada Senin 25 Juli 2022 polisi akhirnya menetapkan Ahyudin dan Ibnu Khajar sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana ACT.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf menjelaskan

keempatnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penyelewengan dana ACT, salah satunya dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp 34 miliar.

“Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp 103 miliar dan sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Helfi.

Helfi menjelaskan, ACT menyalahgunakan dana itu untuk pengadaan armada rice truk senilai

Rp 2 miliar. Lalu, untuk program big food bus senilai Rp 2,8 miliar, dan untuk pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp 8,7 miliar. Kemudian, ada juga Rp 3 miliar digunakan untuk dana talangan CV CUN, serta Rp 7,8 miliar untuk PT MBGS dan untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar. [*]

ROY SURYO, MEME BERUJUNG STATUS TERSANGKA



Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo.

Kasus yang menyeretnya tersebut bermula dari unggahan konten foto stupa Candi Borobudur dengan muka Presiden Jokowi pada 10 Juni 2022.

“Hari ini Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, Jumat 22 Juli 2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah meminta pendapat sejumlah ahli dan keterangan saksi. Total ada 13 saksi ahli dimintai keterangan dan 8 saksi diperiksa polisi.

“Penyidik juga dalam kasus ini telah melakukan pemeriksaan kepada 13 orang saksi ahli,” kata Zulpan.

Dari 13 saksi ahli itu, 3 orang ahli bahasa, 3 orang ahli agama, 1 orang ahli media sosial, 2 orang ahli sosiologi hukum, dan 2 orang ahli ITE. Selain itu, polisi memeriksa 8 orang saksi lainnya.

“Setelah pemeriksaan saksi ahli dan

saksi-saksi lainnya, penyidik menaikkan status Roy Suryo sebagai tersangka.”

Zulpan menjelaskan penetapan tersangka Roy Suryo ini mendasari laporan polisi atas nama pelapor Kurniawan Santoso dan Kevin Wu. Dari hasil penyelidikan terhadap kedua laporan tersebut, polisi kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

“Tentunya penyidik dari Subdit Siber telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor 2857, sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan,” jelas Zulpan.

Dari hasil penyidikan polisi menyatakan postingan Roy Suryo memenuhi unsur pidana. Roy Suryo pun

kemudian ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini.

“Saat ini Saudara Roy Suryo masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka,” tambahnya.

Roy Suryo diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156A KUHP akibat tindakan tersebut.

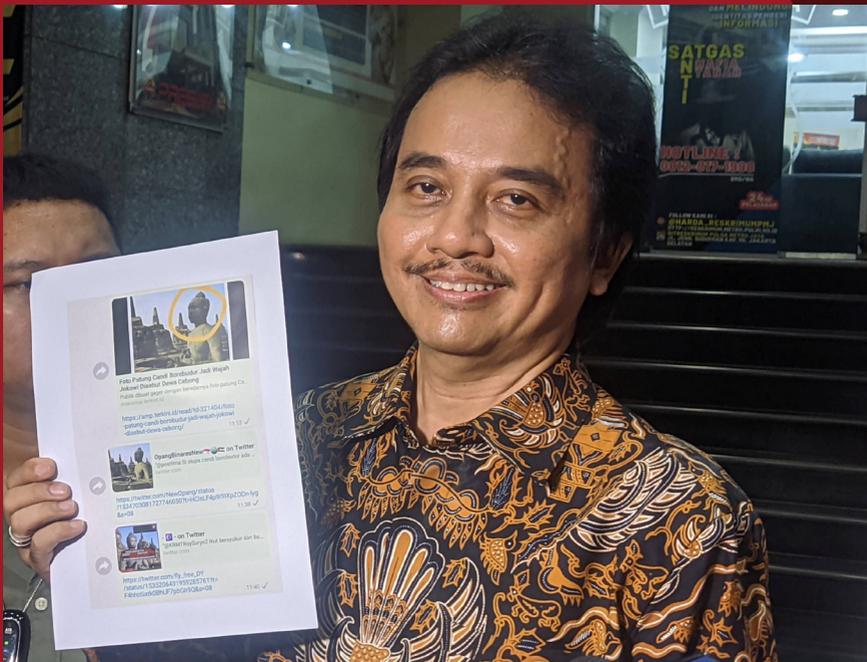
Kombes E. Zulpan menjelaskan Roy Suryo dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau

Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Sedangkan Pasal 45A UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu





berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebelumnya diketahui, Roy Suryo mengunggah tiga foto dengan penjelasan sentilan saat berbicara soal rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur.

“Mumpung akhir pekan, ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dgn Protes Rencana Kenaikan Harga Tiket naik ke Candi Borobudur (dari 50rb) ke 750rb yg (sdh sewarasnya) DITUNDA itu,

• Banyak Kreativitas Netizen mengubah Salah satu Stupa terbuka yg ikonik di Borobudur itu, LUCU, he-3x AMBYAR,” demikian isi cuitan Roy Suryo.

• Unggahan Roy Suryo lantas menuai polemik. Namun setelah memicu kegaduhan, Roy langsung menghapus konten tersebut. Ia pun mengklarifikasi lewat beberapa cuitan di akun Twitternya @KRMTRoySuryo2.

• Dia menjelaskan bahwa unggahan foto Jokowi adalah meme dari orang lain. Tak berhenti di situ saja, Roy Suryo juga mengambil langkah melaporkan akun lain--yang menurutnya--pertama kali memposting meme stupa.

• Ia juga sudah mengajukan

permintaan maaf kepada publik. Namun, permintaan maaf Roy Suryo tak membuat persoalan selesai karena dua orang telah melaporkan Roy Suryo ke kepolisian.

Pelapor pertama adalah Kurniawan Santoso. Pengaduan terdaftar dengan nomor LP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 20 Juni 2022. Pelaporan kedua dilakukan oleh Kevin Wu ke Bareskrim Polri dan terdaftar dengan nomor LP/B/0293/VI/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 20 Juni 2022.

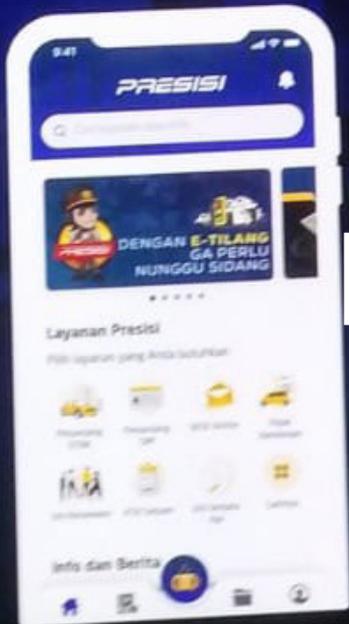
Diperiksa secara maraton oleh tim penyidik Roy Suryo sempat pingsan saat menjalani proses pemeriksaan. Usai pemeriksaan diketahui ia keluar dengan mengenakan kursi roda usai 12 jam pemeriksaan.

Elza Syarief, salah satu tim kuasa hukum yang mendampingi pemeriksaan Roy Suryo menyebut kondisi kesehatan kliennya memang sedang dalam tidak baik ketika menjalani pemeriksaan. Roy Suryo, kata Elza, juga sempat muntah di ruang pemeriksaan. “Ternyata mungkin nggak tidur atau apa, (Roy Suryo) muntah di ruang polisi,” kata Elza.

Namun begitu, Elza mengapresiasi penanganan yang diberikan pihak Polda Metro Jaya. Menurutnya, penyidik memahami kondisi kesehatan Roy Suryo hingga membantu memberikan perawatan di lokasi.

“Habis maghrib saya balik lagi nggak tahunya dia muntah-muntah, lalu dikasih tempat tidur. Baik ya saya melihat penyidiknya, instruksi dari Direktornya luar biasa baik, dirawat bener,” terang Elza. [*]

Akses layanan polisi
di genggaman



Mengenal Apa itu *Superapps* *Presisi*



Polri bertransformasi menuju visi Presisi. Seperti diketahui, salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Transformasi Pelayanan Publik.

Hal ini menunjukkan komitmen Polri yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Aplikasi digital diharap dapat mempermudah publik menjangkau layanan kepolisian.

Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri meluncurkan

aplikasi SuperApps Presisi. Aplikasi itu bertujuan menyederhanakan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari kepolisian.

Polri berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya ada, seperti Dumas Presisi, SINAR, SKCK Online hingga fitur panggilan darurat. Sehingga, masyarakat tak perlu mengunduh

satu persatu aplikasi digital yang tentunya akan membuat boros ruang penyimpanan gawai.

Dalam rangka memberikan pelayanan digital yang prima, Kepala Divisi TIK Irjen Slamet Uliandi menjelaskan SuperApps tersebut nantinya akan menggabungkan aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat di kepolisian juga. Dengan kata lain, segala pelayanan yang dibutuhkan masyarakat bisa diakses dengan hanya satu genggaman.



NOVASI

"Kami harapkan ke depannya dengan adanya sosialisasi ke masyarakat dan menjawab kebutuhan dari masyarakat tentang simple dan sederhana, itu nanti akan disatukan dalam satu wadah namanya SuperApps," kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat 24 Juni 2022.

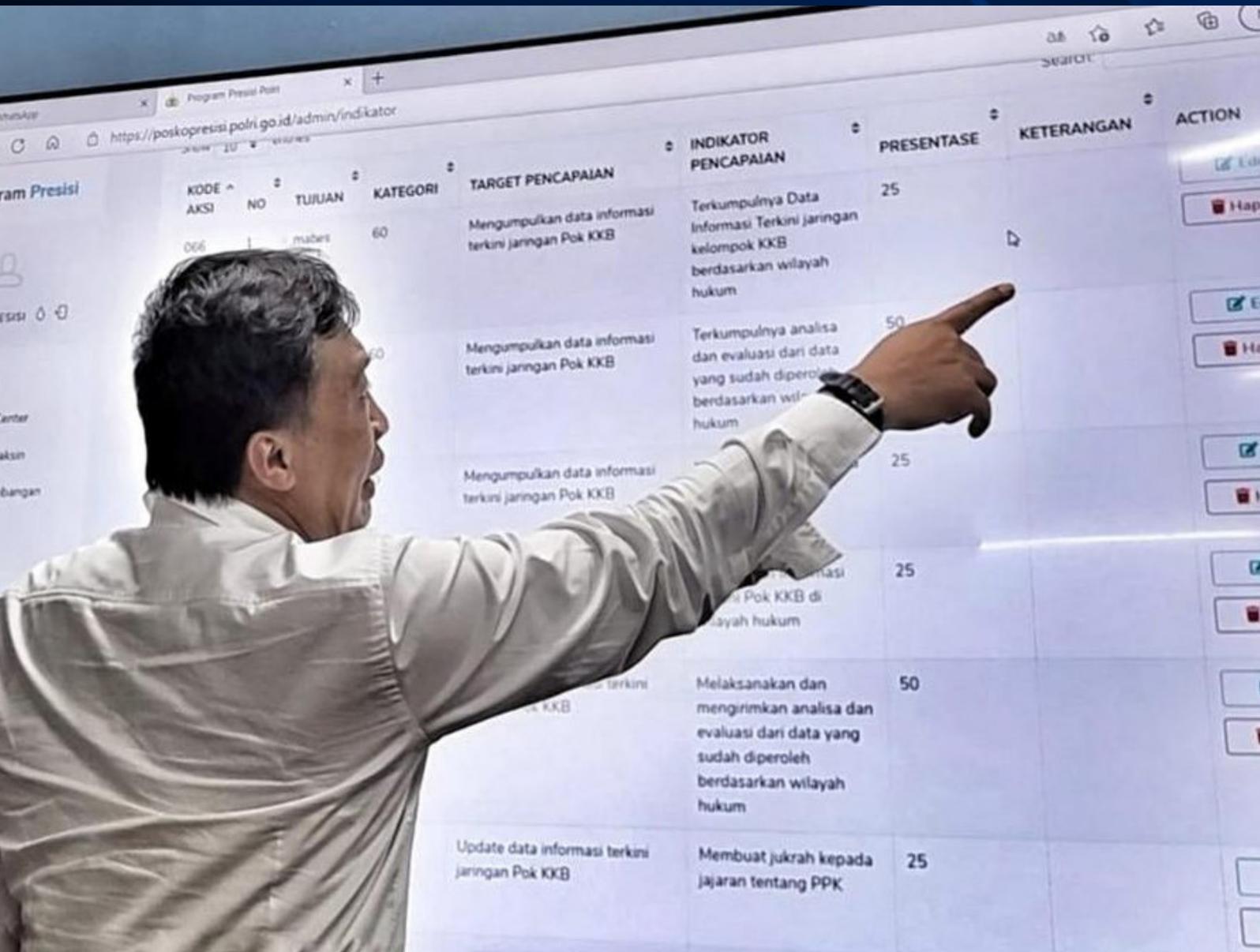
Slamet menerangkan SuperApps Presisi ini tidak akan mematikan kreasi maupun inovasi serta kreativitas dari SDM di masing-masing satuan kerja. Justru membuat aplikasi-aplikasi yang telah ada lebih aman digunakan.

"Cuma kami bisa mengawasi. Kami menyatukan dan memastikan keamanan data dari aplikasi tersebut," ujar mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ini.

Perihal pembuatan Aplikasi SuperApps ini, Slamet mengatakan pihaknya memperhatikan empat pilar sumber daya teknologi, yakni, infrastruktur, aplikasinya itu sendiri, datanya, dan sumber daya manusianya.

"Kalau kita bicara aplikasi, maka aplikasi itu adalah produk dari pada datanya. Nah, setelah disatukan itu kita

"Kami harapkan ke depannya dengan adanya sosialisasi ke masyarakat dan menjawab kebutuhan dari masyarakat tentang simple dan sederhana, itu nanti akan disatukan dalam satu wadah namanya SuperApps,"



**RAKERNIS
DIV TIK POLRI**



DAYA DUKUNG DIV TIK DALAM PENYELENGGARAAN INTEGRASI DAN PELAYANAN TEKNOLOGI POLRI YANG P

IRJEN POL SLAMET ULIANDI, S.I.K.
KADIV TIK POLRI

Rabu, 23 Maret 2022



di data itu kita buat tata kelola datanya. Nah tata kelola datanya itu ada tiga hal: people, proses, dan teknologinya,” ucap Slamet.

Untuk menguatkan hal itu, kata Slamet, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) satu data. Setelah terbit, saat ini, Div TIK Polri membentuk portal satu data.

“Portal satu data itu berkaitan dengan interaksi dan tukar data. Setelah itu kita buat, sebelum portal data kita

buat namanya forum satu data. Nah, forum satu data itu ditandatangani oleh Pak Kapolri nanti ke depannya. Dengan forum satu data itu, menunjuk siapa nanti masing-masing aplikasi itu bertanggung jawab untuk berikan kelola data di dalam satu data Polri itu,” papar Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan ke depan pihaknya mempersiapkan standarisasi data dan standarisasi meta data yang berujung analisis

crosstab agar dalam rangka mengambil kebijakan hanya terjadi margin of error minimal 0,1-1 persen.

“Nah yang kami kembangkan tidak hanya yang tadi saya katakan aplikasi kemudian datanya. Tapi tata kelolanya, regulasinya, yang kami siapkan. Karena memang ini memerlukan waktu, perlunya edukasi, dan sosialisasi. Di samping itu tujuannya juga tidak menghambat aplikasi-aplikasi yang sudah ada di masyarakat,” tutup Slamet.



MENGIKIS PERBEDAAN DENGAN BASUDARA MANISE

Peristiwa bentrok di Pulau Haruku, Maluku Tengah pada akhir Januari 2022, bisa dibilang titik awal perenungan Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seiring waktu, Latif menyadari rutinitas patroli dan kegiatan rutin kepolisian lainnya harus dibarengi satu langkah fokus untuk meredam potensi keributan, terutama antarkelompok warga.

Irjen Latif lalu menggelar banyak pertemuan dengan para tokoh, termasuk pejabat di Maluku serta stakeholders lainnya terkait untuk mencari solusi atas masalah ini, dan mendiskusikan seluk-beluk kehidupan sosial masyarakat setempat. Titik-titik wilayah rawan konflik pun dipetakan dan ternyata jumlahnya cukup banyak yakni 52 titik.

Latif menemukan sebuah konsep yang diyakini bisa mendorong kehidupan bermasyarakat di Maluku lebih damai

dan menekan potensi bentrok, yaitu Basudara Manise. Latif menyampaikan buah pikirnya pertama kali kepada para insan pers di Kota Ambon.

Basudara Manise terus digelorkan untuk membangun persaudaraan warga dengan konsep kearifan lokal. Latif menuturkan Basudara Manise dapat ditetapkan dengan hal sangat sederhana, yakni saling bercerita (bahasa Maluku: bacaraita) antarpihak agar saling memahami.



Meskipun bacarita terdengar sederhana, namun komunikasi antara semua pihak diyakini menjadi dapat menjadi kekuatan untuk mendamaikan Maluku.

“Semakin sering kita bacarita satu sama lain, berkomunikasi, maka semakin mudah kita menyelesaikan sebuah persoalan, dan permasalahan tidak hanya bisa diselesaikan oleh Polri,” ungkap Latif.

Sebagai wujud awal program ini, Polda Maluku memesan 16 ribu botol minuman tradisional atau jus

pala ke masyarakat setempat dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-76 pada 1 Juli kemarin. Langkah ini untuk memberikan penghasilan ke masyarakat, juga membantu memasarkan produk lokal agar semakin dikenal dan nantinya banyak peminat.

Dengan begitu Latif berharap masyarakat memahami kehadiran polisi tak hanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum, namun juga untuk membantu kesejahteraan.

“Jangan hanya seremonial membantu, lalu berhenti. Jika hanya

seperti itu, kita tidak akan pernah tahu kebenaran atau fakta di lapangan,” ucap Latif.

Program Basudara Manise juga mendapat sambutan positif dari Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Kota Ambon. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar Kapolda Maluku bersama para Pimpinan Perguruan Tinggi di Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa 14 Juni 2022.

Mewakili Forum Rektor se-kota Ambon, Rektor Unpatti Ambon Profesor





masih kurang, ditambah masih ada 52 titik potensi konflik antar desa saat ini, kami sangat berharap dukungan dan peran aktif semua pihak dalam menjaga kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku,” tutur Latif menanggapi Sapteno.

Latif menyatakan Polri tidak anti kritik dan selalu membuka ruang diskusi dan berdialog. Program Basudara Manise, kata Latif, merupakan sebuah terobosan kreatif. Tujuannya untuk mewujudkan Maluku yang Aman, Damai dan Sejahtera (Manise).

“Saya akan konsen atas tiga hal yaitu bagaimana saya mewujudkan Keamanan, Perdamaian dan mewujudkan Kesejahteraan bagi masyarakat di Maluku,” harapnya.

Ia mengatakan, terdapat tiga hal untuk mewujudkan keamanan yakni preemtif, preventif dan penegakan hukum. Polda Maluku, lanjut dia, juga kini berupaya untuk terus mewujudkan perdamaian di tanah Maluku. Diantaranya sering bertemu tokoh adat, tokoh masyarakat, para akademisi maupun melakukan patroli bersama dengan TNI Polri.

“Kita sering menyentuh kantong-kantong yang sering konflik. Ada 52 titik konflik yang harus kita selesaikan. Ini adalah upaya kita dalam mewujudkan perdamaian,” jelasnya.

Kemudian menyangkut kesejahteraan masyarakat, Kapolda mengaku pihaknya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.[*]

MJ Sapteno berharap Polda Maluku dapat melakukan pendekatan agama, pendekatan budaya dan pendekatan persaudaraan.

Pendekatan ini, kata Sapteno, terkesan di lihat biasa saja, namun sangat berkesan karena masyarakat akan taat dengan keyakinan agama yang kuat.

“Lembaga kampus saat ini terbuka untuk personel Polri yang ingin menimba ilmu, hal ini sejalan dengan adanya MoU Unpatti Ambon dengan Mabes Polri di bidang peningkatan pendidikan dan sumberdaya manusia pada organisasi Polri,” katanya.

Sapteno juga mengaku pihaknya memberikan kesempatan kepada tenaga profesional untuk memberikan kuliah di Unpatti Ambon. Karena Unpatti juga sangat membutuhkan tenaga profesional dalam meningkatkan kualitas ilmu pada mahasiswa. Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Kota Ambon juga memberikan apresiasi atas rencana pemecahan rekor MURI minum jus Pala terbanyak tahun 2022.

“Kami Polda Maluku dengan segala keterbatasan yang ada saat ini selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Maluku. Dengan jumlah personel kita yang



Uang Koin Itu Antar Rohimah Gaet Hoegeng Awards 2022

Selain bermanfaat sebagai jaring pengaman sosial para lansia di Muaragembong, aksi Rohimah menyabet penghargaan Polisi Berdedikasi Hoegeng Awards 2022.

Terletak di ujung paling utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siapa sangka di Kecamatan Muaragembong sebuah gerakan meski kecil ternyata menjadi sumber inspirasi Korps Bhayangkara.

Adalah Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas) Polsek Muara Gembong Aipda Rohimah berjuang membantu kaum jompo kurang beruntung dengan menggulirkan Program Geserin.

Program yang merupakan akronim dari Gerakan Seribu Koin itu digulirkan Rohimah dengan pengumpulan uang untuk membantu hidup orang-orang lanjut usia di bawah garis kemiskinan.

Niat tulus itu pada akhirnya berbuah manis.

Selain bermanfaat sebagai jaring pengaman sosial para lansia di Muaragembong, aksi Rohimah memperoleh penghargaan sebagai Polisi Berdedikasi dalam acara Hoegeng

Awards 2022, yang digelar dalam rangka HUT ke-76 Bhayangkara pada 1 Juli lalu.

Rohimah mengaku tak menyangka dapat penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah saya nggak nyangka banget dapat menjadi polisi dedikasi. Semoga polisi-polisi di luar sana tetap menebarkan kebaikan di mana pun berada walaupun sedikit Inshaallah berkah dan saya ucapin terima kasih banyak atas kerja samanya dan kepolisian yang telah mengapresiasi



kinerja kita,” kata Rohimah di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 1 Juli 2022 seperti dilansir laman resmi Polres Metro Bekasi.

Rohimah bercerita, ide itu tercetus ketika dirinya melihat koin tercecer di jalanan sementara di sisi lain ia juga terenyuh melihat kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal dunia dalam kondisi sebatang kara.

“Itu yang membuat saya tergerak, ketika ada nenek-nenek di salah satu ujung Muara, tapi sekarang sudah

meninggal. Itu dia sebatang kara. Terus kubilang , ‘Kenapa kita tidak bisa berbuat, menyalurkan itu untuk bergerak,’” kata Rohimah.

Kebutuhan orang-orang mereka inilah yang Rohimah coba untuk dicukupi termasuk ketika ia pernah memperjuangkan kasur untuk seorang nenek yang hidup sebatang kara. Ia menyebut aksi di lingkungan sosial karena dia sudah bertekad dan berjanji kepada Allah SWT.

“Janji saya sama Allah ketika jadi polisi, saya akan membantu orang-

orang yang tidak mampu. Kita berbuat baik itu nggak mesti nunggu kita kaya. Saya masih kekurangan tapi Insyallah saya bisa,” kata dia.

Rohimah bercerita program Geserin atau Gerakan Seribu Koin yang digulirkannya sejak 2017. Pengumpulan koin itu dimaksudkan untuk membantu hidup masyarakat yang membutuhkan di wilayah Muaragembong.

“Gerakan seribu koin dari koin Rp 50 perak, Rp 100 perak, Rp 200 perak itu saya kumpulin. Kadang-kadang teman memberikan sumbangsih setelah itu





“Saya tergerak itu karena memang warga kami rata-rata menengah ke bawah seperti itu, yaitu petani tambak atau petani, nelayan laut mencari rumput laut atau rajungan,”

saya solasiin, saya belanjakan sembako, sembakonya saya berikan kepada yang membutuhkan di Muaragembong rata-rata menengah ke bawah. Untuk lansia saya utamakan,” ujar Rohimah.

Ia menceritakan inspirasinya melakukan program Geserin. Rohimah berniat mengumpulkan sejumlah uang dengan nominal berapa pun untuk membelanjakan sembako yang akan diberikan kepada warga yang membutuhkan.

“Kebetulan saat itu saya lihat uang yang Rp 50 perak, Rp 100 perak. nggakk mungkin gak ada harganya. Saya inisiatif kumpulin alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan dan saya berikan saya belanjakan sembako ke yang membutuhkan,” jelas Rohimah.

Uang itu digunakan untuk berbelanja sembako kepada petani-petani di wilayah Muaragembong. Warga Muaragembong, sambung Rohimah, mayoritas merupakan petani dan nelayan.

“Saya belanjain sayur ke petani langsung asli Muaragembong langsung hasilnya itu saya pajang di Polsek dengan ambilah seperlunya,” ucap Rohimah.

“Saya tergerak itu karena memang warga kami rata-rata menengah ke bawah seperti itu, yaitu petani tambak atau petani, nelayan laut mencari rumput laut atau rajungan,” kata dia.

Saat ini Geserin dimodifikasi menjadi tiga jenis kegiatan yakni Geserin Barokah, Geserin Pahala, dan Geserin

Sayur Koin. Geserin Barokah difokuskan untuk pembagian nasi kotak setiap hari Jumat, sedangkan Geserin Pahala untuk pembagian sembako bagi warga kurang mampu. Sementara Geserin Sayur Koin diperuntukkan membeli sayuran yang ditanam oleh warga agar kesejahteraan mereka ikut terangkat.

Tak hanya menggalang donasi dan bantuan bagi lansia, Rohimah juga aktif dalam mensosialisasi program-program dan aturan kepada warga khususnya di Muara Gembong tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum tanpa mereka sadari.[*]

BINMAS NOKEN

Merebut Hati dan Pikiran DI PAPUA



Memenangkan hati dan pikiran menjadi dasar konsep soft approach bagi masyarakat Papua yang agar tidak tertarik dan terpengaruh propaganda kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Adalah Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si sosok polisi yang dikenal total dan berhasil menjalankan pemberdayaan sosial warga bahkan di sarang KKB.

Atas totalitasnya, Eko yang kini menjabat sebagai Wakapolda Papua dinobatkan sebagai penerima anugerah Hoegeng Awards 2022 dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 dengan kategori Polisi Inovatif.

Eko menyampaikan terimakasih atas penghargaan dan kepercayaan kepadanya dan mengungkapkan apa yang dilakukannya di Papua.

“Esensi utama yang kami bangun adalah pendekatan lain di Papua. Pendekatan lain itu secara umum mungkin rekan-rekan tahu pendekatan di Papua itu agak unik, selama ini hanya perang, perang, kekerasan, dan kekerasan,” kata Eko usai meraih penghargaan tersebut.

Bukan dengan senjata, Eko memelopori pendekatan sosial-kemanusiaan melalui Binmas Noken Papua sejak 2017. Alhasil, Binmas Noken sukses menjauhkan simpati masyarakat terhadap KKB.

Konsep soft approach policing oleh Binmas Noken adalah melalui pembangunan manusia. Pembangunan atau pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan

masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat, dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat.

Tujuan program Bimas Noken tak hanya untuk meningkatkan perekonomian warga. Lebih jauh lagi program tersebut bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkarya, kreatif, dan sehat dalam jangka waktu yang panjang.

Eko memberdayakan aspek sosial-ekonomi masyarakat Papua lewat cara pelatihan ternak. Utamanya ternak babi hewan yang memang biasa dipelihara di Papua itu.

la secara cermat mengidentifikasi daerah mana saja yang cocok untuk wilayah peternakan sesuai kondisi setempat. Ternak yang dia pelopori di berbagai lokasi bervariasi. Ada satu kandang isi 10 ekor babi, ada pula di Timika satu kandang besar isi 100 ekor.

Tak hanya ternak babi, Brigjen Eko juga memberi pelatihan ternak lebah madu Wamena.

Tujuan program Binmas Noken tak hanya untuk meningkatkan perekonomian warga. Lebih jauh lagi program tersebut bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk

berkarya, kreatif, dan sehat dalam jangka waktu yang panjang.

Disebutkan, tujuan konsep Binmas Noken melalui upaya pengembangan komunitas tidaklah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga berupaya memberi peluang untuk membuat kemampuan dan peluang berkarya, serta mempunyai kehidupan yang kreatif dan sehat dalam jangka panjang.

Konsep pendekatan lunak atau humanis yang diterapkan di program Binmas Noken di masa pandemi, dalam praktiknya menggandeng pemerintah daerah di masing-masing kabupaten. Anggota yang mengemban tugas Binmas Noken mengadopsi konsep Kampung Tangguh.

"Dengan diksi Kampung Noken, masyarakat dalam wilayah kampung tersebut diharapkan dapat mandiri mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, baik di bidang keamanan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan, serta ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat," kata Eko.

"Sasaran akhirnya adalah masyarakat produktif dengan berbagai aktivitas pemenuhan kesejahteraan sehingga tidak lagi berpikir membangun ideologi yang berlawanan dengan NKRI," lanjut Eko.

Kegiatan pengembangan operasional Binmas Noken yang didasarkan pada kebijakan masyarakat lokal di antaranya yakni:

1. Kasuari atau Kesejahteraan untuk Anak Negeri dengan mengembangkan kesejahteraan dalam wujud pelatihan dan asistensi pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan kesehatan.

2. Koteka atau Komunikasi Tokoh Elite Kamtibmas yang merepresentasikan kebudayaan Papua dengan wujud berupa komunikasi dengan para tokoh masyarakat dengan harapan dapat menjalin hubungan emosional yang cukup mendalam antara Polri dengan para tokoh. Kegiatan di lakukan secara terus menerus dalam komunitas intelijen dan berkesinambungan sehingga ada 'karya' yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam berkontribusi membangun Papua.





3. Konsep Polisi Pi-Ajar yang digagas oleh Komjen Drs Paulus Waterpaw ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah "Polisi Pergi Mengajar". Dalam program ini Polisi langsung menjadi guru di sekolah-sekolah dasar, pusat kegiatan belajar masyarakat dengan menggunakan metode yang dapat meningkatkan kesenangan, minat baca sejak dini, keinginan anak-anak untuk belajar melalui metode game, sosio-drama, simulasi, media pembelajaran film dan diskusi kelompok.

4. Peka atau Peduli Kamtibmas yang merangsang dan mengajak serta mengarahkan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan dan dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

5. Matoa atau Millennial Torang Maju yang ditujukan untuk menanamkan penghayatan nilai Pancasila, ide nasionalisme, dan wawasan kebangsaan, juga membangun diskusi dan interaksi isu-isu di era globalisasi.

6. Papeda atau Pemuda Pemuda Cendikia yang diimplementasikan

dengan mengajak para cendekia muda untuk berpikir kritis dan membuka wawasan melalui forum terbuka, seperti seminar, kajian pustaka, kuliah umum, bedah buku, dan sebagainya. Program ini di bawah kendali dan tanggung jawab dari Direskrimum, Direskrimsus, dan Dirnarkoba.

7. TIFA atau Torang Insan Fahaman Adat yang ditujukan untuk mengangkat kekayaan budaya, alam dan kearifan lokal Papua yang memberikan modal bagi mekanisme budaya dalam penyelesaian persoalan atau konflik di Papua. [*]



POLISI
BERINTEGRITAS,
Konsisten
Atas Prinsip-Prinsip Kejujuran

Semasa menjadi penyidik di KPK, di antara koleganya semasa itu Akhmad Wiyagus dikenal sebagai salah satu sosok penyidik yang sangat berintegritas dan memegang teguh tugas yang diemban. Ia benar-benar antisuap dan tak bisa dinego.

Integritasnya dibangun pada kepatuhannya dalam menjalankan tugas. Sempat dipromosikan menjadi direktur di KPK, nyatanya ia memilih rela meninggalkan jabatan direktur untuk kembali bertugas di Mabes Polri dan menjabat sebagai kepala unit.

Ia juga dikenal loyal dalam menangani kasus, tidak pernah mundur dan tak berpengaruh dalam melaksanakan tugas.

Sikap lurusnya itulah yang membuat Wiyagus menggaet penghargaan polisi teladan dalam Hoegeng Award 2022 untuk kategori Polisi Berintegritas, Jumat 1 Juli 2022.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengumuman pemenang di Hoegeng Awards 2022 berharap para pemenang tersebut bisa menjadi contoh bagi institusi Polri yang



baik seperti sosok Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

"Pertanyaan berikutnya apakah tidak mungkin muncul Hoegeng-Hoegeng yang baru? Walaupun mungkin tidak seperti Pak Hoegeng idola kita, namun paling tidak semangat, roh, yang kita bangun di institusi Polri untuk kemudian menjadi pegangan bagi kita semua, menjadi arah bagi kita semua untuk institusi yang baik seperti yang diharapkan masyarakat itu bisa terwujud," kata Kapolri.

Diketahui, saat awal diusulkan menjadi kandidat Hoegeng Awards 2022, Irjen Akhmad Wiyagus adalah Kapolda Gorontalo. Namun kini, ia dipindahtugaskan menjadi Kapolda Lampung.

Kesaksian Indraza Marzuki Rais yang merupakan salah satu pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia menyebut, Wiyagus sangat konsisten atas prinsip-prinsip kejujuran dan dia tidak takut untuk berkorban.

"Termasuk untuk menghadapi hal-hal yang mungkin kalau secara manusiawi orang mungkin memilih diam dengan jabatan yang tinggi daripada dia untuk kembali lagi. Dia terima itu semua, padahal dia sangat berprestasi di KPK pada saat itu," kata Indraza.

Indraza juga mengaku mengenal Irjen Wiyagus sebagai sosok yang sederhana yang disebut tidak pernah memamerkan harta maupun keluarganya.

"Jadi dia memang sangat tidak memamerkan, ya. Orang yang sangat tidak memamerkan dan tidak mengutamakan masalah harta. Penampilan dia biasa saja sehari-hari itu biasa saja, jadi tidak bermewah-mewahan," kata dia.

Ia menyebut walaupun dia sudah berpangkat, dia tetap menyapa dan tidak berubah sikapnya dengan sesama teman-temannya itu tidak berubah sikapnya. Dia juga sangat menjaga keluarganya. "Jadi karena saya kenal dalam kedinasan dia sangat menjaga, dia tidak membawa-bawa masalah keluarganya atau memamerkan keluarganya," ujar Indraza.





Sikap disiplin dan integritas Irjen Wiyagus ini disebut diterapkan dan diikuti oleh anak buahnya. Sebagai atasan, Wiyagus dikenal sebagai atasan yang tidak bisa ditawar-tawar bila memberikan tugas. Ketegasannya itulah yang berkesan di hati bawahannya, salah satunya Kapolres Gorontalo Kota AKBP Suka Irawanto.

"Selama saya menjabat hampir satu tahun tujuh bulan merasa baik, berintegritas, tegas, dan Kapolda (Wiyagus) tidak bisa dinego karena tugas. Kalau diperintah, harus dilaksanakan," kata AKBP Suka Irawanto.

Selain tegas tanpa bisa ditawar bila memberikan tugas, Irjen Akhmad

Wiyagus juga bisa bersikap adil terhadap kinerja bawahannya. Dia memberi hadiah untuk bawahannya yang berkinerja baik dan hukuman bagi bawahannya yang berkinerja buruk atau menyalahi ketentuan.

"Beliau selalu memberikan reward and punishment itu langsung. Kapolda orang komitmen memberikan hadiah dan hukuman bagi mereka yang pantas menerima," kata AKBP Suka Irawanto.

Kesaksian lain datang Kapolres Gorontalo AKBP Ahmad Pardomuan. Menurutnya, Akhmad Wiyagus menjaga diri dari situasi yang mengarahkan dirinya untuk menerima suap.

"Kapolda saja kalau ingin bertemu dengan tamu di ruangan Kapolda, pasti

ada orang lain yang bersama-sama," kata dia.

Wiyagus selalu menghindari berbicara berdua dengan tamu. Terutama jika tamu tersebut hendak membahas suatu masalah dan berpotensi meminta bantuan dengan timbal balik suap.

"Sehingga tidak ada yang dibicarakan secara berdua, apalagi kalau ada masalah-masalah. Beliau tidak ada urusan dengan yang begitu," kata Ahmad Pardomuan menegaskan. [*]



Setapak Perubahan,
***MEWUJUDKAN
MIMPI PUTRA
ASMAT***



Senyum sumringah terlukis di wajah Karel Dadimu. Remaja 18 tahun asal Agats, Asmat, Papua tersebut mendapat restu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut rekrutmen Polri.

Siswa yang kini duduk di kelas XII SMA Yan Smith Agats ini berkesempatan berbincang dengan Sigit dalam momen final 'Lomba Menulis Surat untuk Kapolri'.

“Bapak Kapolri, saya bersekolah di Agats, ibu kota dari Kabupaten Asmat. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi seperti Bapak. Bapak Kapolri, saya berharap tes polisi diadakan di Polres setempat agar kami bisa mengikuti tes tersebut dan juga untuk mengurangi biaya,” ungkap Karel.

Kepada Sigit, Karel mengatakan dirinya ingin menjadi polisi karena dia

melihat polisi yang bertugas di Asmat sangat membantu masyarakat. Dia mengaku senang melihat anggota Polri di kampungnya.

“Deket nggak sama masyarakat?” tanya Sigit.

“Siap dekat, Jenderal,” jawab Karel. Sigit kemudian meyakinkan kesungguhan Karel mengabdikan diri untuk Tanah Air. Setelahnya, Sigit menyatakan

akan membantu Karel masuk sebagai anggota Polri. Dan hari Kamis, 23 Juni 2022, akan menjadi tak terlupakan bagi seorang anak asli Suku Asmat dari Kampung Ocenep, Distrik Fayit, Asmat, Karel Dadimu.

Selain mendapat dukungan ikut rekrutmen Polri, siswa yang mengaku setiap sekolah menghabiskan waktu enam jam perjalanan dari rumahnya itu, memboyong Piala Kapolri serta uang

tunai. Karel menyabet Juara I dalam lomba tersebut.

Generasi muda Suku Asmat ini berharap harapannya kepada Polri di Hari Bhayangkara ke-76 ini dapat terwujud.

"Mau masuk sekolah Akpol. Semoga tes polisi cukup di Polres saja, kasihan kami yang dari kampung kalau ke Jayapura, jauh. Belum lagi untuk hidup di Jayapura selama

melaksanakan seleksi tes masuk polisi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolri, Polisi Indonesia dan juga Polres Asmat," ungkap Karel.

Polres Asmat Latih Karel

Polres Asmat turut mendampingi Karel ke Jakarta untuk menerima Piala Kapolri. Polres Asmat mengatakan akan mendampingi dan melatih Karel agar siap saat mengikuti serangkaian tes masuk Polri.



ADAM, 23 Juni 2022
 Kepada Yth
 Kepala Kepolisian Negara
 Republik Indonesia
 di Jakarta

Dengan Hormat,
 saya nama KAREL DADIMU
 KELAS X.P. IPS/1
 MAHA TEKNIK SMA KATOLIK YAN SMY
 DALAM BAKAR KAPOLRI, SAYA AKAN MENJADI
 DARI KAMPUNG OCENEPE, DISTRIK FAYIT, KAMPUNG
 DARI ROTA ASMAT MEMERLUKAN WAKTU 5 JAM

BAPAK KAPOLRI, SAYA BERHARAP TES POLRI
 BISA DI ADAKAN DI POLRES SETEMPAT AGAR KAREL
 BISA MENGIKUTI TES TERSEBUT DAN JUGA UNTUK
 MENGEURANGI BIAYA.

BAPAK KAPOLRI YANG TERHORMAT
 SAYA SANGAT INGIN MENJADI SEORANG
 POLISI, SAYA BERHARAP BAPAK DAPAT MEMBANTU
 KAN HARAPAN DAN CITA-CITA SAYA.

HORMAT SAYA
 KAREL DADIMU

BAPAK KAPOLRI, SAYA BERHARAP TES POLRI
 BISA DI ADAKAN DI POLRES SETEMPAT AGAR KAREL
 BISA MENGIKUTI TES TERSEBUT DAN JUGA UNTUK
 MENGEURANGI BIAYA.

BAPAK KAPOLRI YANG TERHORMAT
 SAYA SANGAT INGIN MENJADI SEORANG
 POLISI, SAYA BERHARAP BAPAK DAPAT MEMBANTU
 KAN HARAPAN DAN CITA-CITA SAYA.

HORMAT SAYA
 KAREL DADIMU



“Adik Karel pun akan saya jaga, saya latih, saya bimbing agar saat mengikuti tes seleksi masuk polisi bisa dilakukan dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Kapolri serta tim Divisi Humas Mabes Polri,” ujar Kasi Humas Polres Asmat Bripka Wahab Abdi.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Humas Polres Asmat dan Polda Papua yang sudah sangat membantu Karel Dadimu untuk bisa hadir pada acara ‘Apresiasi Kreasi Setapak Perubahan Polri’.

Wahab kemudian menceritakan, gema ‘Lomba Menulis Surat untuk Kapolri’ disampaikan memang Polres Asmat kepada sekolah-sekolah di wilayahnya. Lomba ini dibuka untuk

siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA.

Polres Asmat pun mengikuti beberapa lomba, mulai dari Lomba Photography, Lomba Film Pendek, Lomba Menulis Surat untuk Kapolri dan beberapa lainnya. Dalam perlombaan tersebut, Polres Asmat mengirim 6 foto, 1 film pendek dan 1 surat untuk Kapolri dari siswa tingkat SMA.

Saat masa pengumpulan surat, Karel Dadimu datang langsung menghadap Bripka Wahab. Selanjutnya Bripka Wahab langsung bergegas mendaftarkannya, mengingat itu hari terakhir untuk pengiriman file ‘Lomba Surat untuk Kapolri’. Beberapa hari kemudian, Humas Polres Asmat mendapatkan informasi bila tulisan

Karel Dadimu memenangkan Lomba Menulis Surat untuk Kapolri Tingkat SMA.

“Saya senang. Saya tidak menyangka bisa menang lomba. Saya senang Bapak Kapolri mau baca surat dari saya. Saya mau jadi Polisi, makanya tulis surat untuk Kapolri. Terima kasih Bapak Kapolri,” kata Karel, Selasa, 21 Juni 2022.

Karel didampingi langsung Bripka Wahab lalu bertolak ke Jakarta dan menggantikan orang tua Karel karena tak bisa mendampingi, Minggu 19 Juni. [*]

B

UNGA RAMPAI



HOEGENG AWARDS 2022

Nilai Keteladanan yang Tak Pernah Pudar

Legenda polisi jujur sangat lekat dengan sosok Kapolri ke-5, Jenderal Purnawirawan Hoegeng Iman Santoso. Nilai keteladanan tersebut masih membara dalam Korps Bhayangkara.

Tersebut tercermin lewat antusiasme masyarakat merespons Hoegeng Awards 2022, sebuah ajang penghargaan yang pertama kalinya diadakan Polri bekerja sama dengan media online detikcom.

Nama-nama polisi yang dinilai mencerminkan semangat Jenderal Hoegeng, diusulkan masyarakat melalui formulir online ke redaksi detikcom. Masyarakat pun menceritakan pengalaman-pengalaman berkesannya tentang polisi yang diusulkan.

Meski ada masyarakat yang memberikan komentar satire tentang Hoegeng Awards, namun jumlahnya sangat sedikit dibanding yang merespons positif penghargaan ini.

Polri terus berbenah, Polri terus berupaya menjaga amanah. Meski belum seratus persen tubuh penegak hukum ini bersih dari oknum, namun visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa Polri menuju Presisi seakan menjadi seleksi alam.

Mereka yang tak betul-betul mengabdikan untuk negeri, dengan sendirinya tersisih. Sebaliknya, mereka yang menjalankan pengabdian dengan memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya, meski jauh dari gaung pemberitaan, namun sosoknya di masyarakat mewangi.



Optimisme Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada akun Instagram @kepalakepolisian_ri (kini berubah menjadi listyosigitprabowo) mengungkapkan kekagumannya pada Halimah, petugas cleaning service Bandara Internasional Soekarno Hatta yang mengembalikan dompet pengunjung berisi cek senilai Rp 35,9 miliar.

Ada yang merespons postingan tersebut dengan kalimat saran dan dukungan agar Polri semakin profesional, ada pula yang memberikan komentar kritik pedas serta sindiran.

Dalam postingan tersebut, Sigit mengatakan di Polri, ada sosok

Jenderal Hoegeng yang juga dikenal berintegritas. Sigit lalu meyinggung anekdot 3 Polisi Jujur yang populer usai dicelotehkan Presiden RI ke -4, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

Dalam postingan ini, 4 November 2021, Sigit menyebutkan sejumlah sosok polisi yang juga mengabdikan hidupnya dengan tulus, ikhlas dan penuh integritas untuk negara dan masyarakat. Dia pun meyakini masih banyak polisi yang menjalankan profesinya seperti yang Jenderal Hoegeng telah lakukan.

Tak ada yang mengerti suasana batin Kapolri kala itu. Namun, sebelumnya memang ramai pemberitaan tentang perilaku oknum polisi yang

menyimpang, seperti meminta sekarung bawang sebagai 'tanda damai' pada pelanggar aturan lalu lintas; terlibat kasus pencurian disertai kekerasan atau yang dikenal dengan istilah begal di Lampung, menjual amunisi senjata api ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, hingga viralnya video polisi membanting mahasiswa yang berunjuk rasa di Tangerang, Banten.

Medio Desember 2021, Sigit kembali menyoroti citra polisi yang tergerus sejumlah tagar di media sosial. Di antaranya #noviralnojustice; #percumalaporpolisi; dan #satuharisatuoknum. Kegundahan Sigit terkait kepercayaan publik terhadap Polri diungkapkan di acara Rakor Anev





Itwasum Polri 2021, disiarkan secara virtual, Jumat (17/12/2021).

“Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan, mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa,” tutur Sigit saat itu.

Sigit mengatakan, semua penilaian masyarakat ini harus diterima sebagai bagian dari kritik dan evaluasi bagi jajaran kepolisian. Mantan Kabareskrim Polri ini mengajak jajarannya untuk

melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

“Tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, membenah untuk kemudian lakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat,” lanjut dia.

Adapun tagar #percumalaporpolisi sempat ramai di media sosial terkait kecewanya masyarakat terhadap kinerja polisi yang tak sungguh-sungguh dalam memproses kasus yang dilaporkan.

Tagar ini awalnya muncul setelah

berita kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral.

Saat itu sempat menggema di lini masa Twitter pada Rabu (8/10/2021) dan bertahan cukup lama serta diiringi dengan tweet terhadap kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan polisi. Sejak itu, #percumalaporpolisi kerap menjadi trending topic di media sosial setiap kali ada kasus yang terlihat tak adil, atau polisi yang bertindak melanggar aturan.

BUNGA RAMPAI

Selanjutnya, #satuharisatuoknum juga sempat mewarnai media sosial setelah muncul kasus Bripda RB yang diduga meminta seorang mahasiswi berinisial NWR untuk menggugurkan kandungan.

Tentunya semua kasus yang melibatkan oknum kepolisian tersebut disikapi dengan tegas oleh pimpinan Polda jajaran. Sigit tak ingin kasus-kasus tersebut berlarut hingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Tanggung Jawab Kita

Isu demi isu, kejadian demi kejadian di lingkungan kepolisian, selalu

menjadi bahan pembicaraan menarik di masyarakat, termasuk di ruang redaksi media (cetak, elektronik, dan online). Pernyataan optimis Kapolri soal keberadaan polisi yang benar-benar mengabdikan pada Ibu Pertiwi mendapat dukungan dari media online terbesar di Tanah Air, detikcom.

Sebagai media online dengan cakupan pembaca yang sangat luas, redaksi detikcom kerap menerima informasi mengenai sepak terjang polisi-polisi yang dimaksud Sigit. Singkat cerita, muncul ide dari detikcom untuk menggaungkan sepak terjang para polisi yang layak diteladani.

Tentunya usia 76 Polri, bukanlah usia kanak maupun remaja. Polri sudah matang, tentu sudah melahirkan banyak abdi negara yang betul-betul menjaga marwah, selain almarhum Jenderal Hoegeng.

Ide ini sejurus dengan pemikiran Pemimpin Redaksi, Alfito Deannova, bahwa 'Baik-buruknya polisi adalah tanggung jawab masyarakat'. Redaksi detikcom lalu meramu cara yang paling pas dan efektif, dari kacamata jurnalistik, untuk menyemarakkan cerita tentang polisi-polisi yang mengabdikan hidupnya tak hanya untuk institusi, tetapi juga masyarakat luas.



Kisah-kisah polisi yang mencurahkan tenaga, pikiran dan hatinya untuk masyarakat dikemas dalam sebuah momen khusus. Jangan sampai hanya tayang di pemberitaan, lalu menjadi angin lalu. Masyarakat harus optimis dan partisipatif dalam membenahi Polri. Hoegeng Awards 2022 lahir dari pemikiran-pemikiran, serta maksud dan tujuan itu.

Di samping adanya oknum-oknum yang menciderai citra institusi, pun banyak bhayangkara-bhayangkara sejati yang bekerja keras membuktikan pengabdianya kepada masyarakat.

Konsep Hoegeng Awards 2022 bukan ajang ketenaran. Namun untuk mengajak masyarakat berkontribusi terhadap perjalanan Polri. Masyarakat dipersilahkan membagikan cerita tentang polisi-polisi teladan di sekitar mereka. Kisah perjuangan, pelayanan, perlindungan dan pengayoman abdi negara yang terungkap dari kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Polri.

Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022

Demi menjaga objektivitas penilaian Hoegeng Awards, Polri memberikan

kewenangan penuh kepada pada detikcom, dengan catatan tak boleh terjadi 'jeruk menilai jeruk'. Tak ada satupun polisi yang terlibat dalam penyisiran dan seleksi kandidat penerima penghargaan.

Detikcom kemudian membentuk tim yang disebut Dewan Pakar. Dari tahap awal hingga akhir, redaksi detikcom bersama Dewan Pakar melakukan sinergi dan sinkronisasi dalam menyaring serta memilah nama-nama polisi hasil usulan masyarakat.

"Syarat mutlak di Hoegeng Awards adalah nama (polisi yang diusulkan dapat penghargaan) harus muncul dari publik. Jadi nafas Hoegeng Awards ini adalah penilaian masyarakat, jantungnya adalah partisipasi," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam acara Penganugerahan Hoegeng Awards 2022 pada Jumat, 1 Juli 2022.

Choirul Anam atau akrab disapa Cak Anam adalah salah satu Dewan Pakar. Selain Cak Anam, empat Dewan Pakar lainnya adalah:

- Ketua Harian Kompolnas Irjen Purn Benny Mamoto
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
- Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings
- Ketua Jaringan Gusdurian/ Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qotrunnada Wahid.

Lewat hasil diskusi mendalam dengan Dewan Pakar jugalah, Redaksi detikcom disarankan membagi tiga kategori polisi penerima Hoegeng Awards 2022, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, dan Polisi Inovatif.

Poin tertinggi penilaian adalah integritas, dedikasi dan inovasi para personel Polri tersebut harus memberi dampak tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi satuan kerja, masyarakat luas hingga bangsa dan negara.

Alfito menyebut ada 67 ribu lebih nama polisi yang diusulkan masyarakat sebagai penerima Hoegeng Awards, sejak tahap pengusulan dibuka yakni 14 Maret hingga 9 Mei 2022. Dari nama-nama tersebut, dipilih 3 penerima Hoegeng Awards 2022 yakni: Irjen Akhmad Wiyagus, Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto, Ps Kanit Binmas Polsek Muara Gembong Aipda Rohimah.[*]



Jenderal Hoegeng

Inspirasi yang Tak Pernah Mati

Hari yang masih pagi itu membuat mobil melaju lancar. Jarum jam baru menunjuk pukul 06.30 pagi sementara suara berisik walkie talkie menjadi menjadi satu-satunya suara latar.

Meski tak tergesa, barisan becak yang mengular betapapun memaksa mobil itu berhenti. Membuka pintu mobil, sang penumpang itu turun dan lantas menghampiri polisi yang tengah bertugas.

Kepada polisi itu, ia berbicara sebentar dan polisi itu langsung sigap beranjak dan macet pelan-pelan mulai terurai.

Tentu saja polisi lalu lintas itu sigap, karena bagaimanapun yang menghampiri dirinya orang nomor 1 di Korps Bhayangkara. Ia adalah Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Negara yang menjabat sejak 5 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Sementara cuplikan adegan itu merupakan karya dokumenter Michale Rubbo tahun 1971 bertajuk *Wet Earth, Warm People*.

Tak hanya dikenal sebagai sosok yang jujur dan berintegritas, Hoegeng adalah sosok yang rajin dan selalu tiba di Mabes Polri bahkan sebelum pukul 07.00 WIB. Berangkat dari rumahnya di Menteng, ia selalu memilih rute berbeda untuk memantau keadaan lalu lintas sekaligus mengecek kesiapan anak buahnya di jalanan.

Hoegeng juga tak sungkan-sungkan terjun ke lapangan saat suasana ramai seperti malam tahun baru, Natal atau Lebaran. Hoegeng ingin memastikan kehadiran polisi memberikan rasa aman pada rakyat.

Lahir dari pasangan Soekario Hatmodjo dan Oemi Kalsoem, Hoegeng lahir di Pekalongan 14 November 1921. Meski kedua orang tuanya priyayi, Hoegeng kecil dididik dalam kesederhanaan dan diajarkan bersikap rendah hati. Dia tak risih bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa.

Masuk usia sekolah, Hoegeng belajar di *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* dan tamat tahun 1934 dan

melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* di Pekalongan lalu *Algemeene Middlebare School (AMS)* di Yogyakarta.

Menginjak usia 19 tahun Hoegeng melanjutkan kuliah di *Recht Hoge School* di Batavia dan mengikuti kursus di *Provost Marshal General Scholl* di *Military Police School* Port Gordon, George, Amerika Serikat.

Lulus dari sekolah itu, Hoegeng segera menjabat Kepala Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1952. Empat tahun kemudian dia dipindah menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara.

Tahun 1959 dia mengikuti Pendidikan *Brimob* dan menjadi seorang staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara lalu berturut-turut menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966 dan menduduki jabatan puncak di kepolisian tahun 1968.

Soal integritas, Hoeng adalah legenda dan menjadi inspirasi tak hanya bagi Korps Bhayangkara. Bahkan, sosok Presiden ke-4 Abdulrahman Wahid atau Gus Dur pernah

berkelakar dengan menyebut hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, polisi tidur, patung polisi, dan Hoeng.

Ya, bagi Hoeng haram menerima suap ataupun pemberian apapun. Pernah suatu kali, ketika masih menjabat sebagai perwira menengah Hoeng tiba-tiba dipindah ke Medan. Jabatannya mentereng, dia ditunjuk menjadi Kepala Direktorat Reserse Kriminal di Kantor Polisi Daerah Sumut.

Di Medan, penyelundupan dan judi adalah pemandangan sehari-hari. Begitu merajalela, bandar judi nyaris menguasai semuanya. Bukan hanya uang, suap mengambil semua bentuk dari kiriman mobil, perabot mewah bahkan termasuk wanita cantik.

Ketika baru tiba di Pelabuhan Belawan, ternyata utusan bandar judi sudah menemui Hoeng untuk menyampaikan ucapan selamat. Utusan itu menyebut juragannya telah menyiapkan mobil dan rumah untuk Hoeng dan keluarganya.

Tentu saja, tawaran itu dengan halus ditolakny dan memilih tinggal

di Hotel De Boer sembari menunggu rumah dinasny yang dikerjakan tuntas. Tak mau menyerah, utusan bandar judi berusaha lagi. Dua bulan berselang, ketika rumah dinas itu tuntas dikerjakan, giliran Hoeng yang terkejut.

Rumah itu suda dipenuhi barang-barang mewah seperti kulkas, piano, tape dan sofa mahal. Asal tahu saja tahun 1956 kulkas dan piano bahkan belum tentu dimiliki pejabat sekelas menteri sekalipun.

Ketika suruhan bandar judi itu kembali datang, Hoeng mengancam barang-barang itu harus secepatnya dikeluarkan dari rumah dinas. Saat tenggat yang diberikan lewat, Hoeng memerintahkan anak buahnya mengeluarkan barang-barang itu dari rumah. Barang-barang mewah kemudian tergeletak begitu saja kehujanan dan kepanasan di halaman.

Tak hanya jujur, menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian keberanian Hoeng benar-benar bisa menjadi teladan. Ketika di Yogyakarta kasus pemerkosaan Sumarijem atau Sum Kuning menggelinging seperti bola salju Hoeng yang memantau kasus itu memanggil Komandan Polisi Yogyakarta dan Kepala Polisi Jawa Tengah.

Kepada mereka berdua Hoeng memerintahkan untuk mencari siapa mempunyai fakta pemerkosaan tersebut sekaligus membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Pemeriksa Sum Kuning.

"Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak," kata Hoeng.

Entah apa kepentingannya, belakangan Presiden Soeharto sampai turun tangan dengan membentuk sebuah tim pemeriksa dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Luar biasa bukan, urusan kriminal biasa ternyata harus ditangani lembaga superboby itu. Hoeng akhirnya sadar dia berurusan dengan siapa. Ia dipensiunkan dini oleh Presiden Soeharto sebagai Kapolri tanggal 2 Oktober 1971 meski usianya baru 49 tahun. Hoeng menolak tawaran menjadi duta besar. [*]





CATATAN SEJARAH BARU

Divisi Humas Polri



Hampir 72 tahun Humas Polri berdiri. Namun baru kali ini formasi juru bicara diperkuat polisi wanita atau polwan

Melalui telegram rahasia (TR) Kapolri pada akhir Juni lalu, nama Kombes Nurul Azizah tertulis dimutasi sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri.

Perempuan kelahiran 5 November 1972 ini menggantikan Kombes Gatot Repli Handoko, yang selanjutnya dipercaya menjadi Karo Multimedia Divisi Humas Polri.

- Untuk diketahui, tiga jabatan yang mengemban tugas sebagai jubiir di Divisi Humas Polri adalah Kepala Divisi (dijabat Irjen Dedi Prasetyo), Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau biasa disingkat Karo Penmas (dijabat Brigjen Ahmad Ramadhan) dan Kabag Penum. Tak berlebihan jika bergabungnya Nurul saat ini menjadi catatan sejarah baru.
- Sosok pendorong terbentuknya puluhan polres baru ini pernah menjabat

BUNGA RAMPAI

sebagai Kepala Bagian Kajian dan Analis Biro Tata Lembaga Dan Laksana (Kabag Rolemtala) Srena Polri. Dia juga merupakan Dosen Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Latihan (STIK Lemdiklat).

Almunus STIK pada 2007 silam ini sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Program Studi (Kaprosdi) S3 Ditprog Pascasarjana Lemdiklat Polri. Nurul menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada 2012 lalu dan S3 di Universitas Negeri Jakarta pada lima tahun silam.

Makin Berperan

Tak hanya Nurul, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat 2 orang aparatur sipil negara (ASN) perempuan Polri setara dengan bintang satu atau Brigjen pada hari yang sama. Selain itu, seorang polwan juga naik pangkat jadi bintang dua atau Irjen.

ASN yang dinaikkan pangkat itu diungkap oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut kenaikan pangkat ASN setara dengan Brigjen ini adalah untuk pertama kalinya di lingkungan Polri.

"Yang perlu sampaikan ke temen media ini pertama kali dalam sejarah Polri, pada hari ini Bapak Kapolri juga Korps Raport kenaikan pangkat PNS Polri, yaitu golongan 4 atau setingkat bintang satu," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (29/6).

Dua ASN itu adalah dokter Jozyta Rachman, spesialis THT dan dokter Witri Narhadiningsih, spesialis kesehatan jiwa. Selain itu, Kapolri juga menaikkan pangkat seorang jenderal wanita dari brigjen menjadi irjen. Polwan itu adalah Irjen Juansih.





“Termasuk tadi penguuhan untuk kenaikan pangkat Irjen Pol Juansih, polwan dengan pangkat bintang dua,” ujarnya.

Selanjutnya seorang polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi, serta seorang polwan dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar, yakni AKBP dr Siti Nur Imanta.

Pada jabatan kepala bidang (kabid) di jajaran Polda, nama AKBP Titik Wahyuningsih tertulis dimutasi sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.

Kesetaraan Gender

Dedi mengatakan penempatan polwan di posisi strategis ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesetaraan gender. Dedi lalu menyampaikan Polri berkomitmen penuh terus memberikan ruang bagi peran Polwan.

Dia menambahkan, kesetaraan gender akan terus diperjuangkan. Oleh karena itu, Dedi mengatakan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.

Komitmen Polri tersebut disambut hangat Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Andy berharap kepemimpinan polwan di Polri makin progresif.

“Kita mengapresiasi sekali dengan penunjukan di posisi strategis untuk rekan-rekan polisi wanita. Semoga ini menjadi sinyal positifnya untuk kepemimpinan perempuan yang lebih progresif di tubuh Polri,” kata Andy.

Andy bahkan berharap ke depan akan ada polwan yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolda. “Dengan penunjukan strategis ini, kita berharap makin banyak lagi polwan yang ditunjuk dalam posisi komando strategis, termasuk menjadi kapolda,” sambung dia.

Komnas Perempuan juga memupuk harapan agar rekrutmen polwan ditingkatkan dari sisi kuantitas. Menurutnya, sosok polwan dibutuhkan di banyak satuan kerja.

“Kita bisa berharap ada rekrutmen polwan yang lebih banyak, karena memang jumlah polwan masih sedikit dan dibutuhkan di banyak tempat,” jelas Andy. [*]

Kurangi Macet,

Polda Metro Kaji Pengaturan Jam Kerja

Polda Metro Jaya saat ini tengah mematangkan usulan pengaturan jam kerja bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap mengamankan masyarakat Jakarta dan sekitarnya karena wilayah hukum dan Metro Jaya ini di samping Provinsi DKI juga ada Tangerang, Bekasi dan

Depok," kata Endra Zulpan, Selasa 26 Juli 2022.

Pengaturan jam kerja ini menurut Zulpan merupakan demi kelancaran dalam berlalu lintas bagi warga Jakarta dan sekitarnya.

"Kita akan menggelar kekuatan personil di lapangan khususnya lalu lintas untuk memberikan rasa aman kemudian kelancaran dalam dalam berlalu lintas kepada masyarakat. Kita siap mengamankan, tidak ada masalah bagi Polda Metro Jaya," kata dia.

Sebelumnya, usulan mengenai aturan jam kerja ini sebelumnya dikemukakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman guna mengurai kemacetan di kawasan Jakarta.

Kepolisian sampai saat ini masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan akan dibahas jam masuk pagi bagi pekerja sektor esensial dan kritikal.

"Iya tentunya kita akan sounding dan diskusi dulu. Besok juga rencananya



kami akan diskusi dulu. Rencananya hari Kamis," kata Latif Usman, Senin, 25 Juli 2022.

Kata Latif Usman, sejumlah pihak yang akan diundang di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga para pengusaha di ibu kota. Mulai dari Dinas Perhubungan, dari asosiasi pengusaha, angkutan, para pengusaha di Jakarta, pimpinan BPTJ, dari DPRD, dari Kemenpan-RB, Kementerian Tenaga Kerja dan Pemprov DKI akan diajak berdiskusi.

Lebih lanjut, Latif menyatakan ada pro dan kontra atas usulan pengaturan jam kerja yang digaungkannya. Namun, wacana itu datang berdasarkan data kemacetan yang dimiliki kepolisian di Jakarta.

"Ini kan ada ruang yang bisa digunakan untuk mengatur kemacetan di Jakarta, yaitu dibagi jamnya. Mari kita bicarakan sebagai ajang akademisi," katanya.

"Oke secara jangka panjang masalah transportasi umum yang harus

kita benahi. Tapi saat ini yang ada di depan mata kita berupa kebijakan yang bisa mengurangi. Mungkin dari seluruh kelompok masyarakat yang bisa dilakukan pengaturan 10%, 20% kan sangat lumayan dalam mengurangi kemacetan," lanjut Latif.

"Pengertian kita nanti mungkin dibagi kritikal dan esensial, kritikal yang mana esensial yang mana, yang bisa diatur jam masuk. Malam pun sebetulnya ada jam kosong buat yang kerja malam, ada jam malam, sehingga



“Ini kan ada ruang yang bisa digunakan untuk mengatur kemacetan di Jakarta, yaitu dibagi jamnya. Mari kita bicarakan sebagai ajang akademisi,”



seluruh jalur di Jakarta akan merata,” kata Latif.

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari. Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

“Jam 06.00 sampai 09.00 WIB pagi kan padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada

pengaturan kegiatan masyarakat,” kata Latif di Jakarta, Rabu 20 Juli 2022.

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy Pramana mengatakan, pihaknya masih membahas usulan itu secara internal.

“Langkah-langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya pekan depan kami akan rapat dan mengundang pihak terkait,” kata Rusdy di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.

Ditambahkan Rusdy langkah koordinasi dengan pihak terkait itu

dilakukan untuk menghimpun setiap masukan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut. Diharapkan rencana dari pihak kepolisian mengatur jam kerja untuk mengurangi kemacetan dapat semakin matang.

“Ini namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PAN-RB barangkali,” kata dia. [*]



Cegah Wabah PMK, Polda DIY Kerahkan Vaksinator

Mengendalikan dampak penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar vaksinasi dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kandang kelompok ternak.

Sejumlah kandang ternak menjadi sasaran penyemprotan yang dilakukan oleh tim Polda DIY, Selasa 26 Juli 2022.

Termasuk di antara yang dilakukan penyemprotan oleh Tim Polda DIY

adalah sejumlah kandang ternak di Kelompok Ternak Lembu Manunggal, Dawung, Tegaltirto dan Kelompok Ternak Guyub Lembusari, Sonosari, Kadisono.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di kandang Ternak Kelompok Tani Lembu Aji di Dusun Pondok Kulon dan kandang ternak Kelompok Tani Rukun Santosa di Kalipentung, Mangunan, Kalitirto Berbah, Sleman.

Di lokasi kandang kelompok ternak

Lembu Manunggal terdapat 68 ekor sapi yang mendapatkan vaksinasi. Sementara pada kandang kelompok ternak Guyub Lembusari mendapat vaksinasi untuk 26 ekor sapi.

Sedangkan di Kandang Ternak Kelompok Tani Lembu Aji sebanyak 36 ekor sapi dan kandang ternak kelompok tani Rukun Santosa di Kalitirto sebanyak 20 ekor sapi.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Yulianto menambahkan, Polda DIY



“Kita terjunkan anggota (Polda DIY) untuk membantu Pemda DIY menekan penyebaran penyakit tersebut, termasuk tiga anggota yang memiliki keahlian sebagai dokter hewan,”

telah menerjunkan anggotanya yang tergabung dalam Ops Aman Nusa II PMK untuk membantu Pemda DIY menekan laju penyebaran PMK.

“Kita terjunkan anggota (Polda DIY) untuk membantu Pemda DIY menekan penyebaran penyakit tersebut, termasuk tiga anggota yang memiliki keahlian sebagai dokter hewan,” kata dia.

Sementara itu, Kabagada Rolog Polda DIY AKBP drh Tri Rina Noviyanti menuturkan, dalam operasi ini pihaknya menerjunkan langsung tim vaksinator.

Mereka bergabung dengan vaksinator dari Puskesmas Berbah, tim pendukung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sleman, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Penyuluh Pertanian serta inseminator dari Kapanewon Berbah.

“Hari ini menargetkan setidaknya 150 dosis vaksin yang terbagi di dua tempat yakni Kalitirto dan Tegaltirto Berbah,” kata dia.

Sebelum dilakukan vaksinasi dan penyemprotan, personel terlebih dahulu melaksanakan pemantauan baik lingkungan sekitar kandang, dan pengecekan kondisi kesehatan hewan ternak.

Polda DIY akan terus memberikan vaksinasi kepada hewan ternak dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah menekan penyebaran PMK di DIY.



Dorong Mobil Mogok Saat Hujan Deras, Polisi Ini Panen Pujian

Dengan sekuat tenaga ia mendorong mundur mobil yang mogok itu sendirian tanpa bantuan dari warga ataupun anggota polisi lainnya.



Sementara hujan deras mengguyur tak henti bak dituangkan dari langit jalanan di bilangan Jembatan Merdeka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin 4 Juli 2022 langsung macet.

Mobil mogok menghambat jalan sekaligus membuat kendaraan di belakangnya terpaksa antre satu demi satu.

Entah dari mana datangnya, seorang anggota polisi mengenakan jaket hitam bergaris hijau pucuk pisang

mengenakan helm mendorong mobil dan dengan penuh semangat meski terlihat basah kuyup.

Dengan sekuat tenaga ia mendorong mundur mobil yang mogok itu sendirian tanpa bantuan dari warga ataupun anggota polisi lainnya. Aksi heroik itu terekam netizen dan viral di media sosial.

"Singkat cerita, terjadi kemacetan di jembatan merdeka dikarenakan mobil mogok. Salah satu polisi lantas langsung menghampiri dan membantu mobil

tersebut. Kemudian polisi tersebut membantu mendorong mobil maju dan mundur sendirian tanpa bantuan siapa pun," tulis si pengunggah video di laman @shalokalruangkita_srkindonesia.

Aksi anggota polisi ini pun banyak mendapat apresiasi dari para netizen. Tentu saja aksi polisi itu menuai pujian jagad maya.

"Masyaallah, panutan kami seluruh anggota polri, bravo @satlantaspolrestabjm semoga semakin presisi melayani masyarakat dan

“Masyaallah, keren pak pak pol, yg kayak gini harus sering di up di sosmed agar image polisi ngga melulu oknum.”

bernilai ibadah aamiin ya robbal alamin , @listyosigitprabowo @sabana_a_martosumito @humas_poldakasel @polresta.banjarmasin ” tulis netizen dengan akun @agungkristionodregd. “Alhamdulillah di bantu up ” tulis @akhmadabdani

Akun lain yakni @utuh_tangkir berkomentar, “Definisi digaji negara nang beberkah sidin nih... Mudahan sidin di bantu allah jalan hidupnya Ammiinn ”

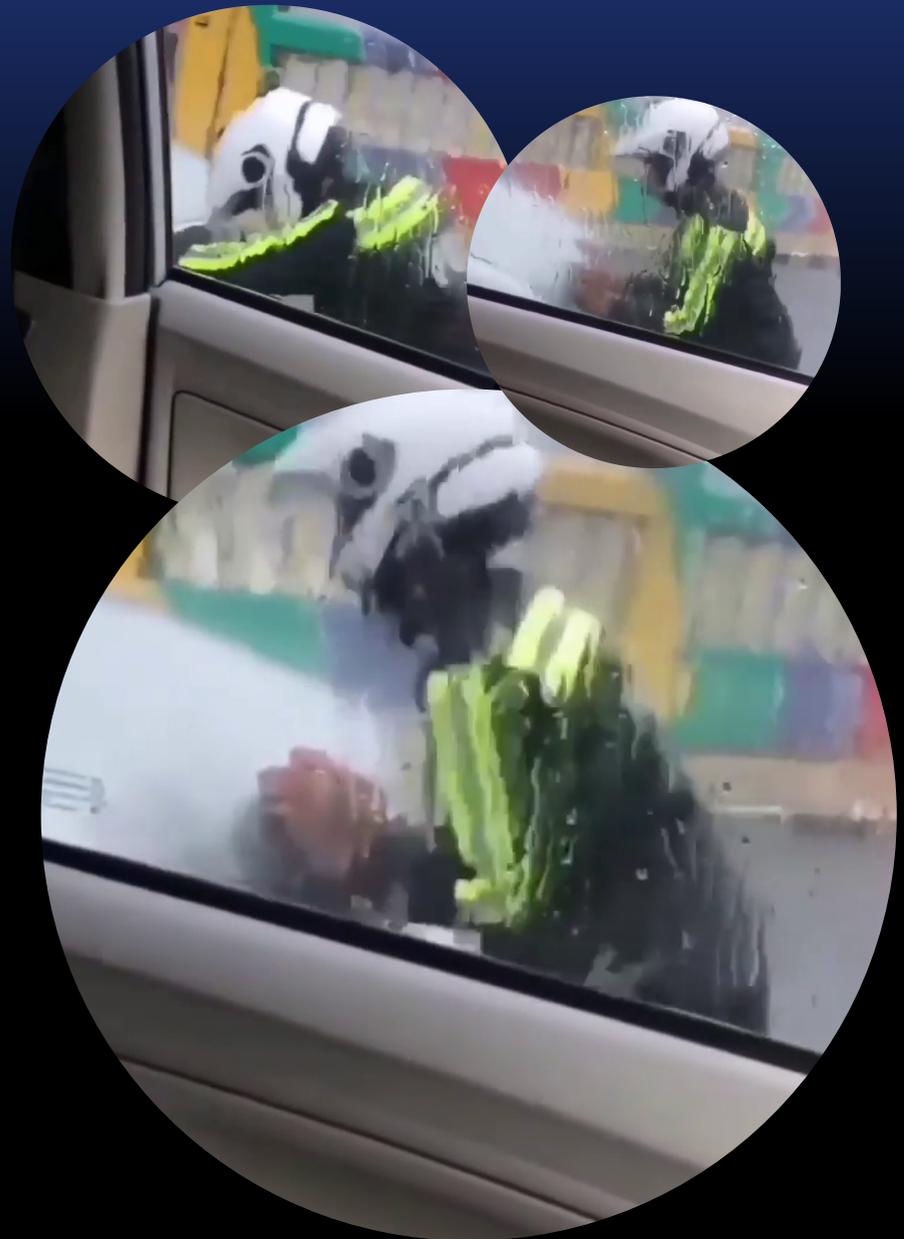
Sementara yang lain, @novikha.sari berkomentar, “masyaallah, keren pak pak pol, yg kayak gini harus sering di up di sosmed agar image polisi ngga melulu oknum.”

Tolong lah untuk jajaran Polda Kassel di catat beliau nih....bagus banar perilaku sdin,” tulis @rerey_bajalanan.

Setelah ditelusuri Humas Polresta Banjarmasin, sosok Polisi tersebut adalah Brigadir Muhammad Heryansyah yang merupakan personel Sat Lalu Lintas Polresta Banjarmasin. Ia mengaku waktu itu dirinya sedang menunggu aplusan piket di Pos Polisi Jembatan Merdeka.

“Waktu itu sedang hujan deras dan terjadi kemacetan yang cukup panjang dari Jalan Lambung Mangkurat sampai Jembatan Merdeka. Setelah saya lihat ternyata ada sebuah mobil yang mogok di tanjakan jembatan,” kata dia, Selasa 05 Juli 2022.

Hery menyebut tanpa pikir panjang, ia berinisiatif langsung mendorong mobil mogok tersebut untuk menepi agar tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Diungkapkannya kembali bahwa sebenarnya sudah biasa dan sering menemukan hal seperti itu.



“Kawan-kawan di Lantas juga pasti sering menemui kejadian seperti ini. Cuma kali ini kebetulan ada yang rekam lalu viral,” kata Brigadir Muhammad Heryansyah.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas apa yang dilakukan Brigadir Hery. Menurutnya apa yang dilakukan personelnnya itu merupakan sikap seorang Polri yang Presisi dan patut dijadikan contoh.

Sabana juga selalu berpesan kepada seluruh personel agar terus berbuat baik dan mengabdikan untuk masyarakat.

“Teruslah berbuat baik, karena kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” kata Kapolresta Banjarmasin.

“Semoga apa yang dilakukan Brigadir Muhammad Heryansyah ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi dirinya, keluarga serta institusi Polri,” kata Kapolresta Banjarmasin.



77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



BINMAS ONLINE SYSTEM (BOS) V2

- Aplikasi untuk Bhabinkamtibmas, BUJP, Satpam dan masyarakat umum
- Masyarakat dapat meminta pertolongan dengan cepat kepada personel Polri melalui fitur Hotline Bhabinkamtibmas
- Layanan interaksi ataupun informasi dan pelaporan masyarakat



DIVISI HUMAS POLRI

DIVISIHUMASPOLRI

DIVHUMAS_POLRI

@DIVHUMAS_POLRI



INOVASI DIVHUMAS BIRO PENMAS POLRI MAJALAH TRIBRATA NEWS TERSEDIA ONLINE



www.humas.polri.go.id